

Katalog: 9102055.2172



POTRET EKONOMI
HASIL PENCAHAHAN LENGKAP SENSUS EKONOMI 2016

POTENSI EKONOMI KOTA TANJUNGPINANG



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA TANJUNGPINANG**

POTRET EKONOMI
HASIL PENCAHAHAN LENGKAP SENSUS EKONOMI 2016

**POTENSI EKONOMI
KOTA TANJUNGPINANG**



Sensus Ekonomi 2016 Analisis Hasil Listing Potensi Ekonomi Kota Tanjungpinang

ISBN :
No. Publikasi : 21720.1717
Katalog : 9102055.2172

Ukuran Buku : 17,6 x 25 cm
Jumlah Halaman : xvii + 101 halaman

Naskah:
Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang

Penyunting:
Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang

Gambar Kulit:
Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang

Diterbitkan oleh:
© Badan Pusat Statistik

Dicetak oleh:
CV. Putra Abadi Jaya

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Penanggungjawab

Mangamputua

Editor

Fajar Maulinda

Penulis

Tri Retno Puspitasari

Beti

Pengolah Data

Tri Retno Puspitasari

<https://tanjungpinangkota.go.id>

Kata Pengantar

Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) merupakan sensus pertanian keempat yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) setiap 10 (sepuluh) tahun sekali sejak 1986. Pelaksanaan SE2016 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) berkewajiban melaksanakan kegiatan Sensus Ekonomi (SE) pada tahun yang berakhir dengan angka enam.

Pelaksanaan SE2016 dilakukan secara bertahap, dimulai dari kegiatan perencanaan dan persiapan pada tahun 2014, hingga kegiatan penyajian dan diseminasi hasil. Pada Tahun 2016, BPS telah melaksanakan kegiatan Listing Sensus Ekonomi Tahun 2016 yang disingkat dengan Listing SE2016. Sedangkan kegiatan lanjutan SE2016 yang dilaksanakan pada tahun 2017 adalah Pendataan Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar Sensus Ekonomi tahun 2016 atau selanjutnya disebut dengan Pendataan UMK dan UMB SE2016.

Buku ini disusun untuk memberi gambaran awal hasil SE2016 mengenai kondisi ekonomi diseluruh lapangan usaha diluar lapangan usaha pertanian juga memberikan gambaran dan informasi terkait potensi ekonomi di Kota Tanjungpinang serta sebagai dasar evaluasi dari realisasi program-program pemerintah dikaitkan dengan data SE2016-L dan data lainnya.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penerbitan publikasi ini, kami juga mengucapkan terima kasih.

Tanjungpinang, Desember 2017
Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Tanjungpinang



Drs. Mangamputua

<https://tanjungpinangkota.bps.go.id>

Kategori Cakupan Sensus Ekonomi 2016

- Kategori B : Pertambangan dan Penggalian
- Kategori C : Industri Pengolahan
- Kategori D : Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin
- Kategori E : Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi
- Kategori F : Konstruksi
- Kategori G : Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil & Sepeda Motor
- Kategori H : Pengangkutan dan Pergudangan
- Kategori I : Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum
- Kategori J : Informasi dan Komunikasi
- Kategori K : Aktivitas Keuangan dan Asuransi
- Kategori L : Real Estat
- Kategori M : Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis
- Kategori N : Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya
- Kategori P : Pendidikan
- Kategori Q : Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial
- Kategori R : Kesenian, Hiburan dan Rekreasi
- Kategori S : Aktivitas Jasa Lainnya
- Kategori U : Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiv
Bab 1	1
Potensi Ekonomi Kota Tanjungpinang	
• Sumber Daya Manusia (SDM)	3
• Kondisi Perekonomi Kota Tanjungpinang	5
Bab 2	11
Faktor Pendukung Perekonomian Tanjungpinang	
• Kualitas sumber Daya Manusia	13
• Infrastruktur Ekonomi	15
• Faktor Lain yang Mendukung Perkembangan Ekonomi Tanjungpinang	16
Bab 3	19
Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Untuk Pembangunan	
• Penggerak Utama Perekonomian Tanjungpinang	21
• Potensi Ekonomi Tanjungpinang	22
Bab 4	35
Perdagangan Besar dan Eceran Sebagai Primadona Ekonomi Tanjungpinang	
• Peranan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran Dalam Perekonomian Kota Tanjungpinang	37
• Keunggulan Perdagangan Besar dan Eceran dalam Menciptakan Lapangan Usaha dan Penyerapan Tenaga Kerja	39
Bab 5	43
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum Potensi Ekonomi Baru Tanjungpinang	

• Potensi Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum dalam Pengembangan Ekonomi Tanjungpinang	45
• Kontribusi dan Peluang Kategori Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum dalam Perekonomian Tanjungpinang	48
Bab 6	51
Keunggulan Komperatif Sektor Konstruksi Dalam Perekonomian Tanjungpinang	
• Peranan Konstruksi dalam Perekonomian Kota Tanjungpinang	53
• Karakteristik Usaha Konstruksi Tanjungpinang	56
Bab 7	59
Aktivitas Keuangan dan Asuransi Sebagai Penyokong Perekonomian Tanjungpinang	
• Perkembangan Aktivitas Keuangan dan Asuransi Tanjungpinang	61
• Aktivitas Keuangan dan Asuransi Menyokong Usaha Mikro dan Kecil	62
Bab 8	65
Pengangkutan dan Pergudangan Potensial Dalam Perekonomian Tanjungpinang	
• Keunggulan Usaha Pengangkutan dan Pergudangan di Tanjungpinang	67
• Karakteristik Usaha Pengangkutan dan Pergudangan di Tanjungpinang	69
Bab 9	71
Informasi dan Komunikasi Sebagai Penunjang Perekonomian Tanjungpinang	
• Perkembangan Usaha Informasi dan Komunikasi di Tanjungpinang	73
• Kontribusi Usaha Informasi dan Komunikasi di Tanjungpinang	75
Bab 10	77
Kategori Unggulan Lainnya di Kota Tanjungpinang	
• Perkembangan Real Estate di Kota Tanjungpinang	79
• Peluang Jasa Perusahaan Dalam Perekonomi Kota Tanjungpinang	81
• Pendidikan Pembentuk SDM Berkualitas	82

- Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial serta Jasa Lainnya
Sebagai Pendukung Perekonomian Tanjungpinang 83

Bab 11 87
Kesimpulan

Daftar Pustaka 91

Lampiran 95

<https://tanjungpinangkota.bps.go.id>

Daftar Tabel

	Tabel 1.1	6
Jumlah Usaha/Perusahaan dan Tenaga Kerja menurut Skala Usaha dan Kecamatan di Kota Tanjungpinang, 2016		
	Tabel 2.1	13
Indikator Indeks Pembangunan Manusia Kota Tanjungpinang, 2014-2016		
	Tabel 2.2	15
Kondisi Jalan di Kota Tanjungpinang, 2016		
	Tabel 2.3	15
Jumlah Pelanggan Listrik Kota Tanjungpinang, 2016		
	Tabel 3.1	27
Hasil Analisis <i>Shift Share</i> (SS) Tanjungpinang dengan Wilayah Referensi Kepulauan Riau, 2016		
	Tabel 3.2	30
Hasil Analisis Tipologi Klassen Tanjungpinang dengan Wilayah Referensi Kepulauan Riau, 2016		
	Tabel 3.3	32
Hasil Analisis <i>Overlay</i> Tanjungpinang dengan Wilayah Referensi Kepulauan Riau, 2016		
	Tabel 4.1	40
Jumlah Usaha/Perusahaan dan Tenaga Kerja Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor di Tanjungpinang menurut Kecamatan, 2016		
	Tabel 5.1	46
Jumlah Usaha/Perusahaan dan Tenaga Kerja Kategori Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum di Tanjungpinang menurut Kecamatan, 2016		

Tabel 6.1 Jumlah Usaha/Perusahaan dan Tenaga Kerja Kategori Konstruksi di Tanjungpinang menurut Kecamatan, 2016	55
Tabel 7.1 Jumlah Usaha/Perusahaan dan Tenaga Kerja Kategori di Tanjungpinang menurut Kecamatan, 2016	63
Tabel 8.1 Jumlah Usaha/Perusahaan dan Tenaga Kerja Kategori Pengangkutan dan Pergudangan di Tanjungpinang menurut Kecamatan, 2016	68
Tabel 9.1 Jumlah Usaha/Perusahaan dan Tenaga Kerja Kategori Pengangkutan dan Pergudangan di Tanjungpinang menurut Kecamatan, 2016	74
Tabel 10.1 Jumlah Usaha/Perusahaan dan Tenaga Kerja Kategori Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial di Tanjungpinang menurut Kecamatan, 2016	83

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Perkembangan Penduduk Kota Tanjungpinang (Jiwa), 2013-2016	3
Gambar 1.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Kesempatan Kerja di Kota Tanjungpinang	4
Gambar 1.3 Persentase Tenaga Kerja menurut Skala Usaha di Kota Tanjungpinang, 2016	5
Gambar 1.4 Jumlah Usaha/Perusahaan menurut Skala Usaha di Kota Tanjungpinang, 2016	5
Gambar 1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Tanjungpinang (Persen), 2014-2016	7
Gambar 1.6 Perbandingan PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau (Juta Rupiah), 2015-2016	8
Gambar 1.7 Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota Terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Riau (Persen), 2016	9
Gambar 2.1 Persentase Tenaga Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Tanjungpinang	14
Gambar 2.2 Banyaknya Usaha Dalam Pemanfaatan Media Internet, 2016	17

Gambar 3.1	21
Banyaknya Usaha Menurut Kategori di Tanjungpinang, 2016	
Gambar 3.2	23
Hasil Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ) Tanjungpinang dengan Wilayah Referansi Kepulauan Riau, 2016	
Gambar 3.3	25
Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Tanjungpinang dengan Wilayah Referansi Kepulauan Riau, 2016	
Gambar 3.4	30
Pola dan Karakteristik Tanjungpinang dengan Wilayah Referansi Kepulauan Riau, 2016	
Gambar 4.1	37
Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Tanjungpinang (Persen), 2013-2016	
Gambar 4.2	38
Laju Pertumbuhan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Tanjungpinang (Persen), 2013-2016	
Gambar 4.3	39
Jumlah Usaha Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Tanjungpinang Menurut Skala Usaha, 2016	
Gambar 4.4	39
Kontribusi Usaha dan Tenaga Kerja di Kota Tanjungpinang Menurut Kategori Usaha, 2016	
Gambar 5.1	45
Pertumbuhan Kategori Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum Tanjungpinang (Persen), 2016	

Gambar 5.2	47
Jumlah Usaha/Perusahaan dan Persentase Tenaga Kerja Kategori Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum di Tanjungpinang menurut Skala Usaha, 2016	
Gambar 5.3	48
Kontribusi Kategori Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum dalam Pembentukan PDRB di Tanjungpinang (Persen), 2016	
Gambar 6.1	53
Kontribusi Konstruksi terhadap PDRB Kota Tanjungpinang (Persen), 2013-2016	
Gambar 6.2	54
Laju Pertumbuhan PDRB Konstruksi Kota Tanjungpinang (Persen) 2013-2016	
Gambar 6.3	55
Jumlah Usaha dan Tenaga Kerja Kategori Konstruksi di Tanjungpinang, 2016	
Gambar 6.4	56
Jumlah Usaha Konstruksi Kota Tanjungpinang Menurut Kode Kualifikasi Usaha, 2016	
Gambar 7.1	61
Pertumbuhan Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Tanjungpinang (Persen), 2013-2016	
Gambar 8.1	67
Kontribusi Kategori Pengangkutan dan Pergudangan Terhadap PDRB Kota Tanjungpinang (Persen), 2013-2016	
Gambar 8.2	69
Persentase Jumlah Usaha/Perusahaan dan Kategori Pengangkutan dan Pergudangan di Tanjungpinang menurut Skala Usaha, 2016	

	Gambar 8.3	69
Persentase Jumlah Tenaga Kerja Kategori Pengangkutan dan Pergudangan di Tanjungpinang menurut Skala Usaha, 2016		
	Gambar 9.1	73
Pertumbuhan Kategori Informasi dan Komunikasi Tanjungpinang (Persen), 2013-2016		
	Gambar 9.2	75
Persentase Jumlah Usaha/Perusahaan dan Tenaga Kerja Kategori Informasi dan Komunikasi di Tanjungpinang menurut Skala Usaha, 2016		
	Gambar 10.1	79
Pertumbuhan Kategori Real Estate Tanjungpinang (Persen) 2013-2016		
	Gambar 10.2	80
Persebaran Usaha/Perusahaan Real Estate di Kota Tanjungpinang Menurut Skala Usaha (Persen), 2016		
	Gambar 10.3	80
Persebaran Tenaga Kerja Real Estate di Kota Tanjungpinang (Persen), 2016		
	Gambar 10.4	81
Pertumbuhan Kategori Jasa Perusahaan di Kota Tanjungpinang (Persen), 2013-2016		
	Gambar 10.5	82
Pertumbuhan Kategori Pendidikan di Kota Tanjungpinang (Persen), 2013-2016		



bab

1



Potensi Ekonomi Kota Tanjungpinang

<https://tanjungpinangkota.bps.go.id>

Potensi Ekonomi Kota Tanjungpinang

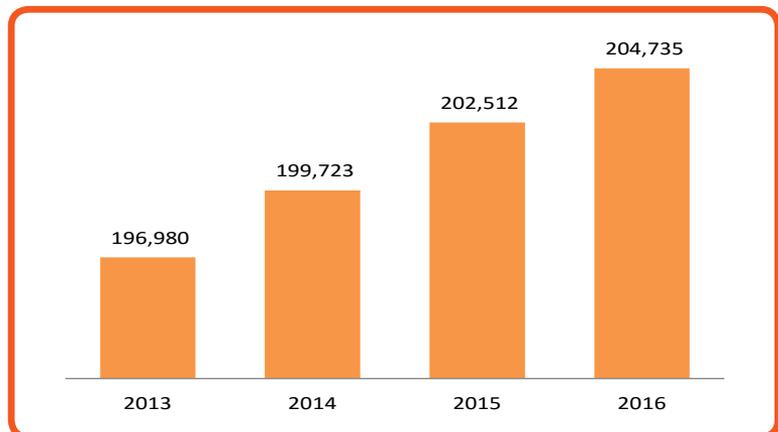
1. Sumber Daya Manusia (SDM)

1.1 Tenaga Kerja

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam proses pembentukan nilai tambah pada kegiatan ekonomi. Tenaga kerja sebagai salah satu input dalam proses produksi yang merupakan salah satu faktor kunci bagi peningkatan produktivitas suatu nilai tambah produksi. Pertumbuhan penduduk serta yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja dianggap sebagai faktor positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Jadi semakin banyak jumlah angkatan kerja Kota Tanjungpinang, maka semakin banyak pasokan tenaga kerja dan semakin banyak jumlah penduduk Kota Tanjungpinang maka akan meningkatkan potensi pasar.

Berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk Kota Tanjungpinang Tahun 2016 adalah 204.735 jiwa mengalami peningkatan 2.520 jiwa dari tahun 2015 sebesar 202.215 jiwa. Jika dilihat dari komposisi penduduk Kota Tanjungpinang didominasi oleh usia produktif.

Gambar 1.1
Perkembangan Penduduk Kota Tanjungpinang (Jiwa),
2013-2016



Sumber: BPS, Hasil Proyeksi jumlah Penduduk

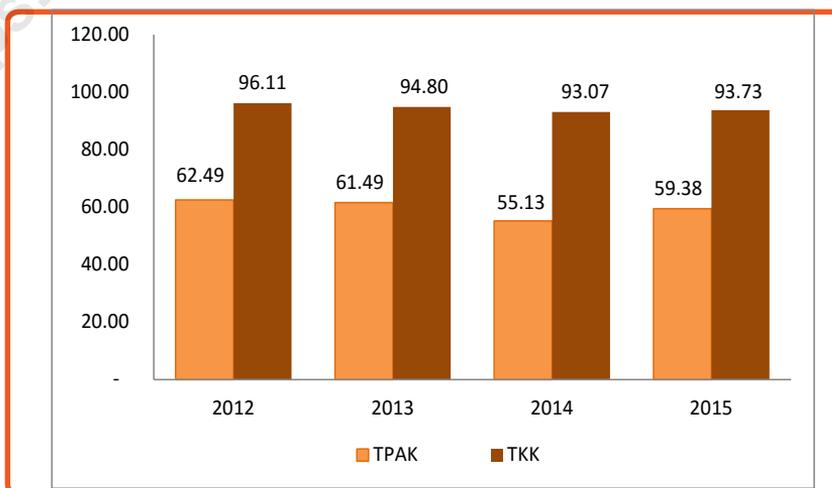
Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional menunjukkan bahwa terjadi penurunan TPAK di Kota Tanjungpinang, namun TKK justru mengalami kenaikan. Tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2015 turun 3,05 poin dari tahun 2014, sedangkan tingkat kesempatan kerja naik 0,66 poin.

Jumlah Penduduk Usia Kerja Kota Tanjungpinang cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Peningkatan tersebut diiringi dengan peningkatan jumlah penduduk pada golongan angkatan kerja. Jumlah penduduk di Kota Tanjungpinang yang termasuk angkatan kerja tahun 2015 sebanyak 85.865 orang, dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 59,84 persen yang artinya dari 100 orang penduduk usia 15 tahun keatas, sebanyak 60 orang telah aktif dalam aktivitas ekonomi (bekerja). Kondisi Angkatan Kerja yang cukup besar ini menunjukkan bahwa supply (ketersediaan) angkatan kerja yang siap untuk menjadi faktor produksi dalam kegiatan perekonomian cukup tersedia di Kota Tanjungpinang.

Supply Angkatan Kerja yang siap sedia aktif dalam kegiatan ekonomi di Kota Tanjungpinang dapat dikatakan terserap cukup baik. Penyerapan Angkatan Kerja ini ditunjukkan dari Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) yang berkisar di atas 90 persen paling tidak selama 5 tahun terakhir. Nilai TKK pada tahun 2012 sebesar 96,11 persen merupakan TKK tertinggi sepanjang periode 2012-2015. TKK Kota Tanjungpinang sempat mengalami penurunan selama 2 tahun berturut-turut tetapi sedikit meningkat kembali pada tahun 2015 mencapai 93,73 persen. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa 94 persen Angkatan Kerja di Kota Tanjungpinang pada tahun 2015 memiliki status bekerja.

Pengelolaan ketenagakerjaan suatu daerah harus memperhatikan tingkat penyerapan Angkatan Kerja yang dicerminkan melalui TKK. Nilai TKK yang menjauhi 100 persen merupakan suatu indikasi bahwa lapangan kerja yang tersedia pada suatu daerah tidak cukup menampung angkatan kerja yang dimiliki.

Gambar 1.2
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Kesempatan Kerja
Di Kota Tanjungpinang (persen), 2012-2015



Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2012-2015

1.2 Usaha Mikro Kecil Mendominasi Perekonomian

Perkembangan hasil SE2016 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja non pertanian yang cukup signifikan. Jumlah tenaga kerja non pertanian naik sebesar 69 persen selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir, yaitu dari 35.528 tenaga kerja di tahun 2006 menjadi 59.975 tenaga kerja di tahun 2016.

Tercatat 14.882 perusahaan di tahun 2006, meningkat menjadi 19.586 perusahaan di tahun 2016.

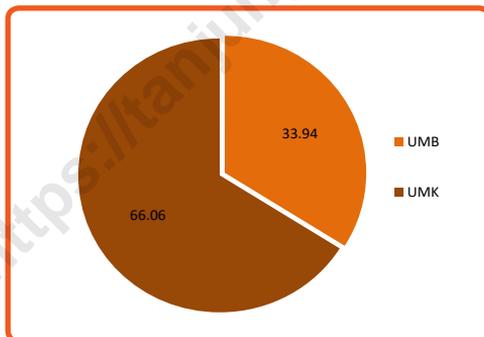
di Kota Tanjungpinang juga tercermin dari meningkatnya jumlah perusahaan nonpertanian, baik Usaha Mikro Kecil (UMK) maupun Usaha Mikro Besar (UMB). Jumlah perusahaan nonpertanian meningkat sebesar 32 persen, dari sebanyak 14.882 perusahaan di tahun 2006 menjadi sebanyak 19.586 perusahaan di tahun 2016.

Berdasarkan skalanya, usaha dalam perekonomian dapat diklasifikasikan menjadi Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar. Peningkatan usaha nonpertanian

Persebaran jumlah usaha/perusahaan terbanyak dan pertumbuhan tertinggi dibanding sepuluh tahun lalu terdapat di Kecamatan Tanjungpinang

Gambar 1.3

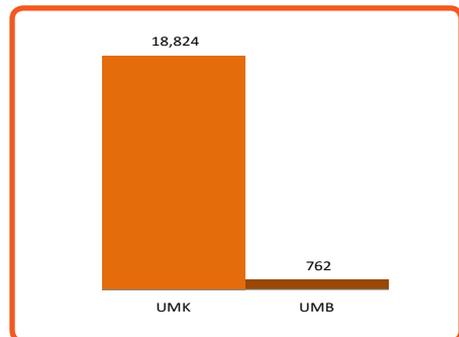
Persentase Tenaga Kerja menurut Skala Usaha Di Kota Tanjungpinang, 2016



Sumber: Hasil SE2016 Listing

Gambar 1.4

Jumlah Usaha/Perusahaan menurut Skala Usaha Di Kota Tanjungpinang, 2016



Sumber: Hasil SE2016 Listing

Timur yaitu sebanyak 7.771 usaha/perusahaan dengan pertumbuhan sekitar 102,53 persen. Sebaliknya di Kecamatan Tanjungpinang Kota mengalami penurunan jumlah usaha/perusahaan sebesar 15,79 persen yang semula 3.439 berdasarkan hasil SE2006 menjadi 2.896 tahun 2016. Berdasarkan hasil sensus sepuluh tahun lalu juga memperlihatkan bahwa 26,98 persen usaha terdapat di Kecamatan Bukit Bestari. Dengan ini menggambarkan bahwa pusat perekonomian yang semula berada di Kecamatan Bukit Bestari mulai ada pergeseran menuju kearah Kecamatan Tanjungpinang Timur. Hal ini dapat didukung dengan luas wilayah Kecamatan Tanjungpinang Timur lebih luas dibandingkan kecamatan lain.

Berdasarkan hasil lising SE2016 Usaha Mikro Kecil (UMK) mendominasi aktivitas ekonomi di Kota Tanjungpinang baik dari jumlah usaha/perusahaan maupun tenaga kerja. Sekitar 96,11 persen dari jumlah perusahaan non pertanian merupakan UMK dengan tenaga kerja yang mampu diserap sebanyak 39.619 orang, atau sekitar 66,06 persen. Sedangkan jumlah usaha/perusahaan UMB hanya sebanyak 762 unit usaha dan hanya menyerap 20.356 pekerja atau sekitar 33,94 persen.

Persebaran jumlah tenaga kerja terbanyak juga terdapat di Kecamatan Tanjungpinang Timur sebesar 39,79 persen (23,863 orang) dengan proporsi 63,92 persen merupakan tenaga kerja UMK, tenaga kerja yang terdapat di Kecamatan Bukit Bestari sebesar 25,36 persen (15,209 orang) dengan jumlah tenaga kerja UMK sebesar 72,25 persen. Selanjutnya 17,71 persen tenaga kerja (10,620 orang) terdapat di Kecamatan Tanjungpinang Timur dengan 54,41 persen merupakan tenaga kerja UMK dan 17,15 persen (10,283 orang) terdapat di Kecamatan Tanjungpinang Barat dengan tenaga kerja UMK sebesar 73,91 persen. Meskipun Usaha Mikro Kecil (UMK) mendominasi dalam penyerapan tenaga kerja, namun dalam setiap usaha/perusahaan secara rata-rata hanya mampu menyerap 2 tenaga kerja. Sedangkan setiap satu Usaha Menengah Besar (UMB) secara rata-rata mampu menyerap 27 tenaga kerja.

UMK tidak hanya merupakan tumpuan mata pencaharian penduduk Kota Tanjungpinang tetapi juga sumber aktivitas yang memperkuat sendi perekonomian baik pada tingkat regional bahkan nasional. Beberapa penelitian membuktikan bahwa UMK merupakan usaha yang memiliki fleksibilitas dan ketahanan yang tinggi terhadap guncangan ekonomi global. Proteksi ekonomi dan penguatan investasi pada skala usaha mikro kecil harus tetap diperkuat untuk mendukung keberlanjutan perekonomian daerah.

Tabel 1.1
Jumlah Usaha/Perusahaan dan Tenaga Kerja menurut Skala Usaha dan Kecamatan di Kota Tanjungpinang, 2016

Kecamatan	Usaha/ Perusahaan		Tenaga Kerja	
	UMK	UMB	UMK	UMB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bukit Besari	4 883	174	10 988	4 221
Tanjungpinang Timur	7 393	378	15 253	8 610
Tanjungpinang Kota	2 788	108	5 778	4 842
Tanjungpinang Barat	3 760	102	7 600	2 683
KOTA TANJUNGPINANG	18 824	762	39 619	20 356

Sumber: Hasil SE2016 Listing

2 Kondisi Perekonomian Kota Tanjungpinang

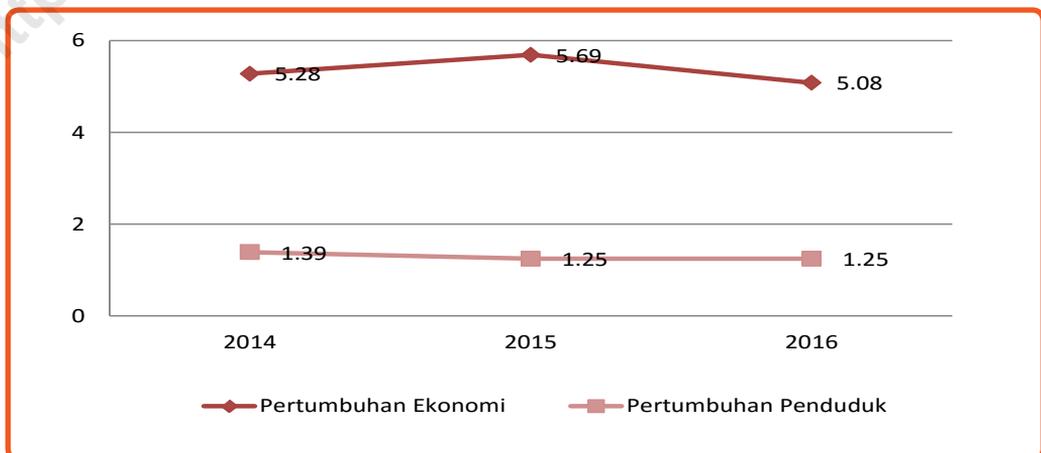
2.1 Perekonomian Kota Tanjungpinang Tumbuh Dengan Stabil

Tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu wilayah adalah tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Proses perkembangan itu terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama dimana dapat terjadi penurunan atau kenaikan, namun secara umum menunjukkan kecenderungan untuk naik. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan serta lebih cepat dari laju pertumbuhan penduduknya juga merupakan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi, karena pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dapat menimbulkan berbagai masalah dan hambatan dalam pembangunan ekonomi terutama masalah ketersediaan lapangan usaha.

Gambaran perekonomian Kota Tanjungpinang selama tiga tahun terakhir berada dalam kondisi yang relatif stabil, terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang berada pada kisaran 5 persen tiap tahunnya. Kondisi yang stabil diperlihatkan juga dengan laju pertumbuhan penduduk dengan kisaran 1,25 persen hingga 1,39 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungpinang lebih cepat bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduknya. Kondisi pertumbuhan ekonomi yang stabil ini menjadikan Tanjungpinang sangat berpeluang untuk mencapai taraf kesejahteraan masyarakatnya, dengan salah satu kunci mampu memberdayakan SDM yang ada. Salah satu caranya adalah dengan perbaikan mutu SDM yang dapat ditempuh dengan peningkatan mutu pendidikan dan keahlian bagi penduduk Kota Tanjungpinang.

Gambar 1.5

Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Tanjungpinang (Persen), 2014-2016



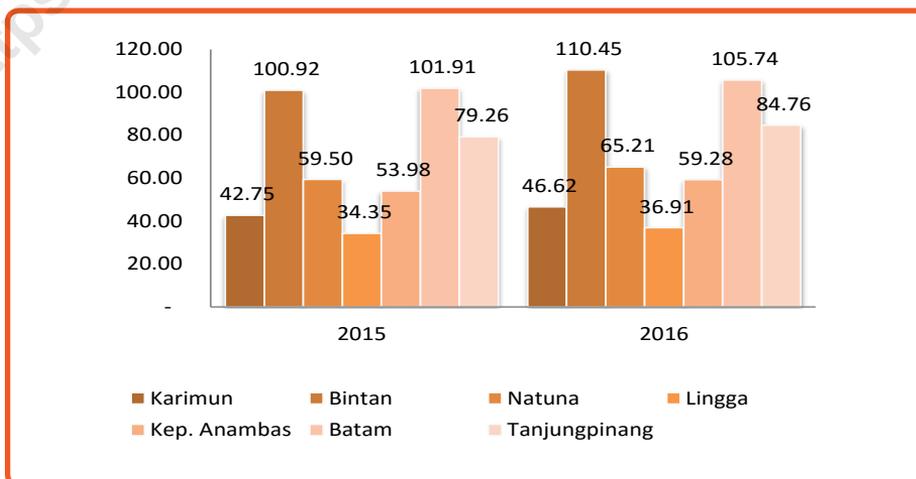
Sumber: BPS, Hasil Olah PDRB Menurut Lapangan Usaha 2014-2016

Taraf kesejahteraan penduduk Tanjungpinang dapat diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Karena pembangunan ekonomi di daerah-daerah yang sedang berkembang seperti Kota Tanjungpinang adalah untuk meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Pendapatan riil per kapita merupakan output secara keseluruhan yang dihasilkan pada suatu wilayah selama satu tahun yang dibagi dengan jumlah penduduknya. Dengan demikian kualitas hidup tidak akan dapat ditingkatkan kecuali jika total output meningkat lebih cepat dari pada pertumbuhan jumlah penduduk.

Pada Gambar 1.6 dapat memperlihatkan perbandingan PDRB per kapita dengan beberapa kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau, PDRB per kapita Kabupaten Bintan melampaui PDRB per kapita Kota Tanjungpinang yang hanya mencapai Rp. 84,76 juta pada tahun 2016. Kondisi ini masih lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Karimun dengan PDRB per kapita yang hanya sebesar Rp. 46,62 juta pada tahun 2016. PDRB per kapita Kota Tanjungpinang di wilayah Provinsi Kepulauan Riau berada pada peringkat ke 3 dari 7 Kabupaten/Kota yang ada.

Jika dibandingkan dengan tingkat provinsi, pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungpinang tahun 2016 lebih tinggi 0,31 poin dari pertumbuhan Provinsi Kepulauan Riau. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau tanpa migas terus melambat selama kurun waktu 2014-2016, pertumbuhannya mulai dari 6,81 persen di tahun 2014 menjadi 4,77 persen di tahun 2016. Sedangkan pertumbuhan ekonomi di Kota Tanjungpinang berada pada level 5,28 persen tahun 2014, 5,69 persen di tahun 2015 dan 5,08 persen di tahun 2016.

Gambar 1.6
Perbandingan PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Riau
(Juta rupiah), 2015-2016



Sumber: BPS, PDRB Menurut Lapangan Usaha, 2015-2016

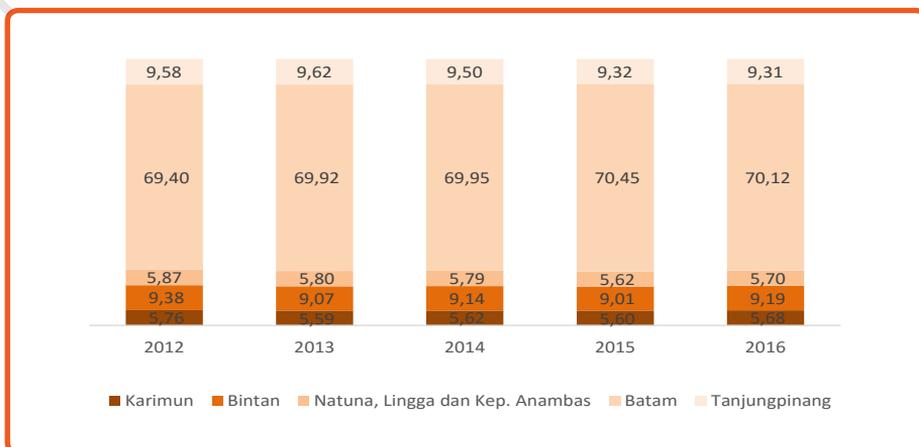
2.2 Kontribusi Perekonomian Kota Tanjungpinang Terhadap Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau

Pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan serangkaian proses yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kondisi perekonomian daerah tersebut. Setiap daerah memiliki sumber daya serta kondisi alam dan infrastruktur yang berbeda satu sama lainnya. Perbedaan kondisi setiap daerah tentunya akan berdampak pada perbedaan potensi ekonomi yang dimilikinya.

Kota Tanjungpinang sebagai ibu kota provinsi yang berada di Kawasan Kepulauan Riau termasuk wilayah yang dapat dikatakan memiliki tingkat pembangunan yang relatif tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Kepulauan Riau. Ketimpangan pembangunan dibandingkan wilayah lain di Kepulauan Riau dapat terlihat dari berbagai sisi, mulai dari keuntungan wilayah Kota Tanjungpinang yang merupakan pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau

Tidak hanya pada level nasional, bahkan dalam lingkup wilayah Kepulauan Riau sendiri ketimpangan pembangunan ekonomi juga terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa berada dalam suatu wilayah yang sama dan berdekatan tidak serta merta meniadakan ketimpangan pembangunan. Gambar 1.7 menunjukkan perkembangan kontribusi PDRB menurut Kabupaten/Kota di Wilayah Kepulauan Riau. Dari gambar tersebut, terlihat bahwa Kota Tanjungpinang memiliki porsi terbesar kedua terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan, yakni sebesar 9,35 persen. Porsi terbesar diberikan oleh Kota Batam, dengan kontribusi 70,12 persen terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Riau. Berbanding terbalik, Kabupaten Anambas berkontribusi paling kecil, yang bahkan tidak mencapai 6 persen terhadap total PDRB Provinsi Kepulauan Riau.

Gambar 1.7
Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota Terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Riau (Persen), 2016



Sumber: BPS, PDRB Menurut Lapangan Usaha, 2012-2016

bab
2



Faktor Pendukung
Perekonomian
Tanjungpinang

<https://tanjungpinangkota.bps.go.id>

Faktor Pendukung Perekonomian Kota Tanjungpinang

1. Kualitas Sumber Daya Manusia

1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Pengukuran keberhasilan suatu daerah tidak hanya ditandai oleh tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup kualitas manusianya. Untuk melihat tingkat kualitas Sumber Daya Manusia di suatu daerah bisa dilihat dari Indeks Pembangunan manusianya dimana indeks pembangunan manusia (IPM) mencakup tiga point penting yaitu masalah kesehatan, pendidikan dan daya beli.

Tabel 2.1

Indikator Indeks Pembangunan Manusia Kota Tanjungpinang Tahun 2014 -2016

Indikator	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Harapan Hidup (tahun)	71,55	71,65	71,74
Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,03	14,05	14,06
Rata - rata Lama Sekolah (tahun)	9,94	9,95	9,96
Pengeluaran per kapita yang disesuaikan	14 141	14 446	14 645
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77,29	77,57	77,77
Pertumbuhan IPM (%)	0.77	0.36	0,26

Sumber: Badan Pusat Statistik

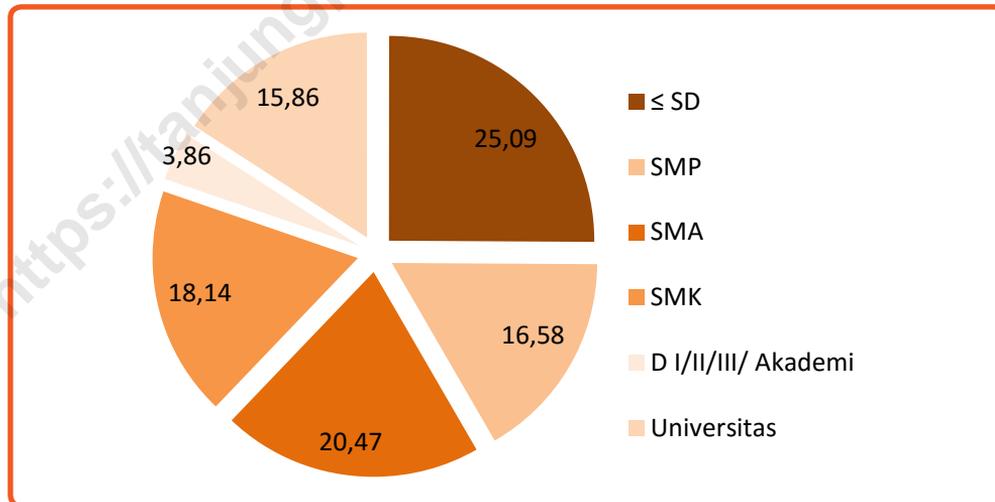
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tanjungpinang tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan dari tahun 2014 dengan IPM 77,29 menjadi 77,77 pada tahun 2016. Selama kurun waktu 2014 - 2016 seluruh variabel pokok pendukung IPM kota Tanjungpinang mengalami peningkatan

yang mengindikasikan semakin baiknya kualitas manusia di Kota Tanjungpinang. Data menunjukkan bahwa IPM Kota Tanjungpinang masuk dalam kategori tinggi yaitu sebesar 77,77 dengan angka harapan hidup 71,74 tahun, harapan lama sekolah 14,06 tahun, rata-rata lama sekolah 9,96 tahun dan pengeluaran perkapita 14 645 ribu /per orang/tahun. IPM Kota Tanjungpinang berada diatas IPM Provinsi Kepulauan Riau sebesar 73,99.

1.2 Tenaga Kerja Menurut Tingkat Pendidikan

Gambaran umum tingkat kecerdasan penduduk disuatu daerah dapat ditunjukkan dengan kemampuan membaca dan menulis (Angka Melek Huruf) dari penduduknya. Angka melek huruf dapat dijadikan indikator tingkat pendidikan penduduk suatu daerah, karna dengan kemampuan tersebut seseorang dapat menyerap dan menerima ilmu pengetahuan. Rata-rata lama sekolah di Kota Tanjungpinang adalah 9,95 tahun. Ini berarti rata-rata pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk di Kota Tanjungpinang setingkat Sekolah Menengah Atas / Kejuruan. Sementara untuk angka melek huruf Kota Tanjungpinang adalah sebesar 98,64 persen dengan persentase kemampuan laki-laki lebih tinggi dari penduduk perempuannya. Dengan angka melek huruf sebesar ini artinya hanya sekitar 1,36 persen saja penduduk Kota Tanjungpinang yang buta huruf.

Gambar 2.1
Persentase Tenaga Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Tanjungpinang, 2015



Sumber: BPS, Hasil Olahan Sakernas 2015

Tingkat pendidikan merupakan salah satu elemen penting dalam meningkatkan sumber daya manusia dalam pembangunan. Tenaga kerja merupakan sumber daya manusia yang kualitasnya dapat ditentukan dengan tingkat pendidikan. Berdasarkan hasil survei angkatan kerja nasional 2015 sebanyak 80.275 penduduk Kota Tanjungpinang yang bekerja dimana pekerja dengan pendidikan lulusan SMA menduduki urutan tertinggi sebanyak

16.432 pekerja, lulusan SMK diurutan kedua dengan jumlah pekerja sebanyak 14.561 pekerja. Sedangkan lulusan Universitas menempati urutan ke empat tertinggi dengan 12.732 pekerja.

Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi 2016 jumlah tenaga kerja tercatat sebanyak 59.975 pekerja. Dari 80.275 angkatan kerja yang bekerja di Kota Tanjungpinang 74,71 persen bekerja pada Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Menengah Besar (UMB). Ini menunjukkan betapa tingginya potensi penyerapan tenaga kerja pada UMK dan UMB.

2 Infrastruktur Ekonomi

Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama dalam pembangunan suatu daerah, sebab infrastruktur merupakan pilar utama dari pertumbuhan ekonomi. Luas wilayah Kota Tanjungpinang 150,86 Km², memiliki panjang jalan keseluruhan 399,58 km dimana jalan dengan kondisi di aspal sepanjang 254,61 km, jalan kondisi kerikil sepanjang 115,54 km, dan jalan tanah sepanjang 29,43 km. Sekitar 63,7 persen kondisi jalan di Kota Tanjungpinang sudah diaspal.

Selain jalan, infrastruktur ekonomi yang dibutuhkan dalam peningkatan ekonomi adalah adanya ketersediaan pasar/ kelompok pertokoan, Bank dan ketersediaan aliran listrik yang digunakan baik untuk rumah tangga maupun untuk industri. Sektor perbankan berfungsi sebagai penghimpun dan pengatur dana, memegang peranan sentral dalam suatu perekonomian. Jumlah Bank di kota Tanjungpinang tahun 2016 sebanyak 84 bank. Sensus Ekonomi 2016 dari kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi (K) didominasi oleh Usaha Menengah Besar (UMB) yaitu sebesar 68,30 persen dari UMK dimana aktivitas yang tergolong UMB pada kategori ini salah satunya perusahaan-perusahaan perbankan yang ada di Tanjungpinang. Jadi 84 bank yang ada telah berkontribusi dalam peningkatan perekonomian kota Tanjungpinang.

Tabel 2.2

Kondisi Jalan di Kota Tanjungpinang, 2016

Uraian	2015	2016
(1)	(2)	(3)
Aspal	239,92	254,61
Kerikil / Semen	120,96	115,54
Tanah	38,69	29,43

Sumber: Tanjungpinang Dalam Angka 2017

Tabel 2.3

Jumlah Pelanggan Listrik Kota Tanjungpinang, 2016

Pelanggan	Jumlah
(1)	(2)
Rumah Tangga	64 214
Bisnis	11 305
Sosial	779
Instansi Pemerintah	457
Industri	38

Sumber: Tanjungpinang Dalam Angka 2017

Perekonomian Kota Tanjungpinang juga ditunjang oleh ketersediaan aliran listrik. Untuk memenuhi kebutuhan akan listrik di Kota Tanjungpinang tersedia 2 pembangkit tenaga diesel dengan kapasitas daya terpasang 66.354 KW. Daya yang terpasang saat ini mampu memenuhi kebutuhan sebanyak 76.793 pelanggan. Dari 76.793 pelanggan listrik di Kota Tanjungpinang, sekitar 83 persen diantaranya merupakan pelanggan rumah tangga.

3 Faktor lain yang Mendukung Perkembangan Ekonomi Kota Tanjungpinang

3.1 Letak Geografis Kota Tanjungpinang

Letak kota Tanjungpinang berada di Pulau Bintan dengan letak geografis berada pada 0 51 sampai dengan 0 59 Lintang Utara dan 104 23 sampai dengan 104 3 Bujur Timur.

Batas-batas wilayah administrasi kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

- Utara : Kabupaten Bintan
- Selatan : Kabupaten Bintan
- Barat : Kota Batam
- Timur : Kabupaten Bintan

Posisi Kota Tanjungpinang sangat strategis, disamping berdekatan dengan Kota Batam sebagai kawasan perdagangan bebas, dan negara Singapura sebagai pusat perdagangan dunia, Kota Tanjungpinang juga terletak diposisi silang perdagangan dan pelayaran dunia, antara timur dan barat yaitu samudra Hindia dan Laut China Selatan.

Dengan Posisi geografis yang berbatasan langsung dengan Singapura, Tanjungpinang mendapatkan keuntungan-keuntungan yang dapat menunjang peningkatan perekonomian Kota Tanjungpinang. Keuntungan-keuntungan itu seperti dalam sektor pariwisata. Tanjungpinang yang merupakan penghubung antar pulau-pulau di provinsi Kepri memudahkan wisatawan untuk mengakses daerah wisata di provinsi Kepulauan Riau. Pelabuhan yang dimiliki bersifat domestik dan internasional yang memudahkan mobilitas wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Dilihat dari perkembangan kunjungan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kota Tanjungpinang dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 2,27 persen dari 91.179 wisatawan di tahun 2015 naik menjadi 93.249 wisatawan di tahun 2016.

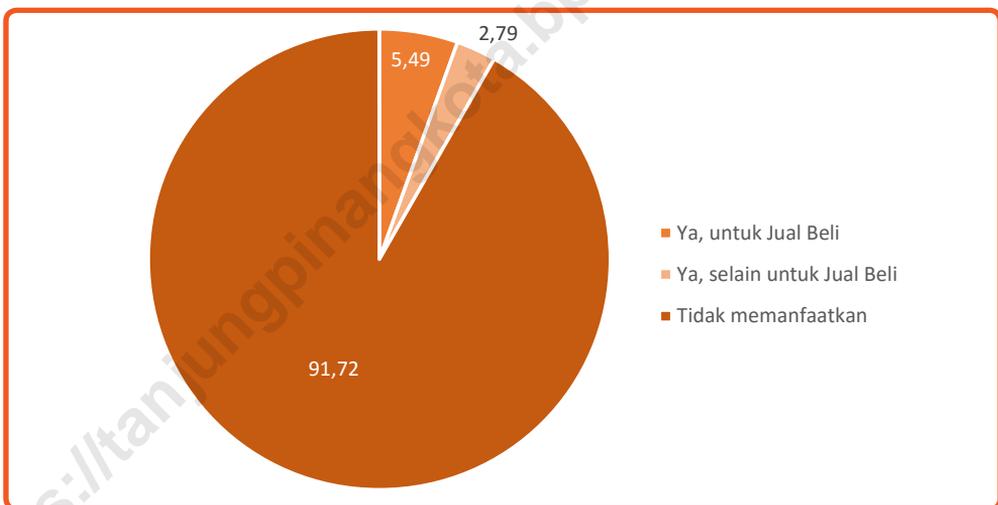
3.2 Perkembangan Teknologi dan Informasi

Awal tahun 2017 merupakan babak baru bagi perkembangan Kota Tanjungpinang sebagai daerah ibukota Provinsi Kepulauan Riau, menuju Tanjungpinang Smart City. Diawali dengan terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Kota Tanjungpinang mulai mengggagas dan mengkonsep pembangunan

smart city. Konsep smart city sendiri merupakan respon untuk menjawab perkembangan teknologi dan informasi.(Sumber :Tanjungpinang pos).

Perkembangan teknologi dan informasi tentunya berpengaruh terhadap perekonomian kota Tanjungpinang. Berdasarkan sensus ekonomi 2016 sebagian perusahaan di kota Tanjungpinang sudah memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi khususnya internet. sebanyak 1.075 perusahaan menggunakan internet untuk proses jual beli, 546 perusahaan menggunakan internet selain untuk proses jual beli dan sebanyak 17 965 perusahaan belum memanfaatkan media internet dalam proses transaksinya.

Gambar 2.2
Persentase Banyaknya Usaha Dalam Pemanfaatan Media Internet, 2016



Sumber: BPS, Olah Hasil SE2016 Listing

bab 3



Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Untuk Pembangunan

Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Untuk Pembangunan

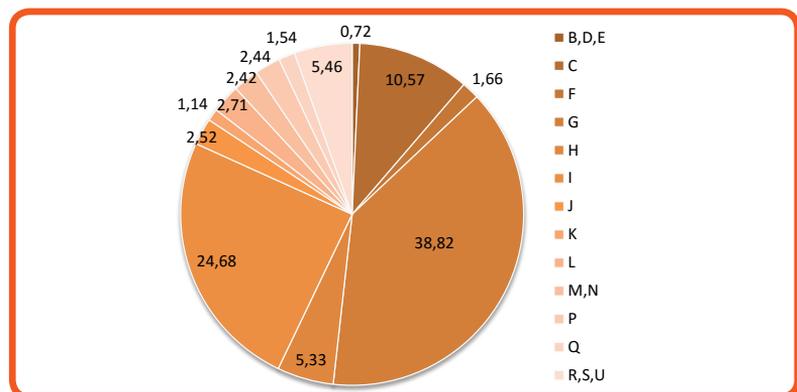
1. Penggerak Utama Perekonomian Tanjungpinang

Kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor (Kategori G) mendominasi aktivitas perekonomian di Kota Tanjungpinang. Usaha yang termasuk pada lapangan usaha tersebut tercatat sebanyak 7.603 unit (38,82 persen) terdiri dari 7.396 unit UMK dan 207 unit UMB. Lapangan usaha lain yang turut mendominasi dari sisi jumlah usaha yang ada ialah Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (kategori I) sebesar 24,68 persen yang terdiri dari 4.792 unit UMK dan 41 unit UMB. Selanjutnya Kategori Industri Pengolahan (kategori C) dengan jumlah usaha sebanyak 2.071 unit (10,57 persen), yang terdiri dari 2.047 unit UMK dan 24 unit UMB.

Seiring dengan dominasinya dari sisi jumlah usaha, penyerapan tenaga kerja pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor (kategori G) juga memegang peranan yang terbesar. Sekitar 27,29 persen tenaga kerja yang ada di Kota Tanjungpinang bekerja pada lapangan usaha ini. Akan tetapi penyerapan tenaga kerja pada kategori ini masih didominasi oleh skala usaha UMK, yaitu sekitar 79,56 persen.

Gambar 3.1

Banyaknya Usaha Menurut Kategori di Tanjungpinang (Persen), 2016



Sumber: Hasil SE2016 Listing

2 Potensi Ekonomi Tanjungpinang

Penentuan potensi ekonomi yang dimiliki suatu daerah tentu tidak dapat dilakukan tanpa dasar. Adapun dalam publikasi ini akan diidentifikasi kategori atau lapangan usaha yang potensial di Provinsi Papua Barat dengan menggunakan 4 (empat) alat analisis, yakni Analisis Location Quotient (LQ); Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP); Analisis Shift Share; dan Analisis Tipologi Klassen. Hasil dari 4 alat analisis tersebut kemudian akan disandingkan (overlay) sehingga dapat menunjukkan lapangan usaha apa yang potensial di Kota Tanjungpinang.

2.1 Analisis Location Quotient (LQ)

Analisis *Location Quotient* digunakan untuk menunjukkan besar kecilnya peranan kategori perekonomian suatu wilayah dengan membandingkan kategori yang sama pada wilayah yang lebih besar. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi kategori ekonomi unggulan yang dapat dikembangkan pada suatu wilayah. Selain itu, analisis ini juga dipergunakan untuk mengidentifikasi keunggulan komparatif (*comparative advantage*) suatu wilayah. Rumus LQ yang digunakan dalam publikasi ini adalah sebagai berikut:

$$LQ_i = \frac{S_{ij}/S_j}{S_{in}/S_n}$$

Keterangan:

S_{ij} : Jumlah tenaga kerja pada sektor i pada wilayah analisis j.

S_j : Jumlah tenaga kerja pada wilayah analisis j.

S_{in} : Jumlah tenaga kerja pada sektor i di wilayah referensi.

S_n : Jumlah tenaga kerja di wilayah referensi.

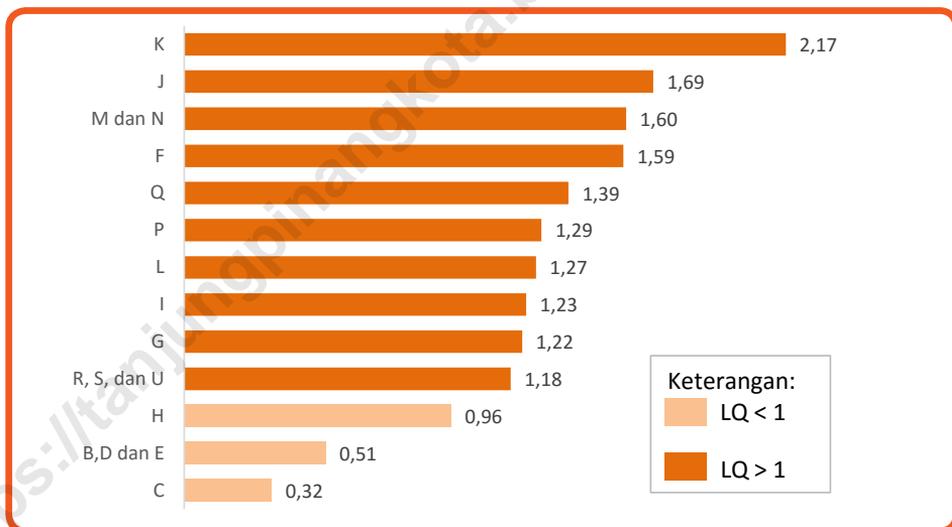
Nilai penghitungan Analisis LQ dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Jika nilai $LQ > 1$, berarti kategori tersebut merupakan kategori unggulan dalam menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan kategori yang sama di wilayah Kepulauan Riau.
2. Jika nilai $LQ < 1$, berarti kategori tersebut bukan merupakan kategori unggulan karena penyerapan tenaganya lebih rendah dibandingkan dengan penyerapan tenaga kerja dari kategori yang sama di wilayah Kepulauan Riau.

Kesimpulan yang dapat ditarik bahwa bila nilai $LQ > 1$, kategori tersebut merupakan kategori unggulan atau memiliki keunggulan komparatif di wilayah Maluku dan Papua. Dengan kata lain, kategori tersebut potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian daerah. Sebaliknya, bila suatu kategori memiliki nilai $LQ < 1$, berarti kategori tersebut bukan merupakan kategori unggulan di daerah dan kurang potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian daerah.

Gambar 3.2 merupakan hasil olah analisis LQ dengan wilayah referensi Kepulauan Riau. Hasil Analisis LQ yang dilakukan menunjukkan bahwa Kota Tanjungpinang memiliki 10 (sepuluh) kategori yang memiliki keunggulan komparatif di wilayah Kepulauan Riau. Kategori tersebut antara lain: Aktivitas Keuangan Dan Asuransi (K); Informasi dan Komunikasi (J); Jasa Perusahaan (M,N); Konstruksi (F); Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial (Q); Pendidikan (P); Real Estat (L); Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (I); Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (G); dan Jasa Lainnya (R,S,U).

Gambar 3.2
Hasil Analisis Location Quotient (LQ) Tanjungpinang dengan
Wilayah Referensi Kepulauan Riau, 2016



Sumber: Hasil SE2016 Listing

2.2 Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

Analisis MRP merupakan alat analisis lain dirasakan penting dipergunakan untuk mengidentifikasi kategori ekonomi potensial suatu daerah. Hal ini mengacu kepada rekomendasi Yusuf (1999), yang menganjurkan untuk menggunakan lebih dari satu alat analisis dalam mengidentifikasi kategori ekonomi potensial di suatu wilayah. Analisis berikut yang digunakan untuk mengidentifikasi kategori ekonomi yang potensial adalah analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP). Metode identifikasi dari analisis ini ialah berdasarkan kriteria pertumbuhan PDRB.

Tujuan analisis MRP adalah untuk mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan PDRB (*competitive advantage*). Rumus yang digunakan dalam penghitungan analisis MRP adalah:

$$RP_{ip} = \frac{(y_{ipt} - y_{ip0})/y_{ip0}}{(y_{pt} - y_{p0})/y_{p0}}$$

$$RP_{in} = \frac{(y_{int} - y_{ino})/y_{ino}}{(y_{nt} - y_{no})/y_{no}}$$

Keterangan:

y_{ipt} = PDRB kategori i wilayah analisis p thn 2016

y_{ip0} = PDRB sektor i wilayah analisis p thn 2010

y_{pt} = PDRB total wilayah analisis p thn 2016

y_{p0} = PDRB total wilayah analisis p thn 2010

y_{int} = PDRB sektor i wilayah referensi thn 2016

y_{ino} = PDRB sektor i wilayah referensi thn 2010

y_{nt} = PDRB wilayah referensi thn 2016

y_{no} = PDRB wilayah referensi thn 2010

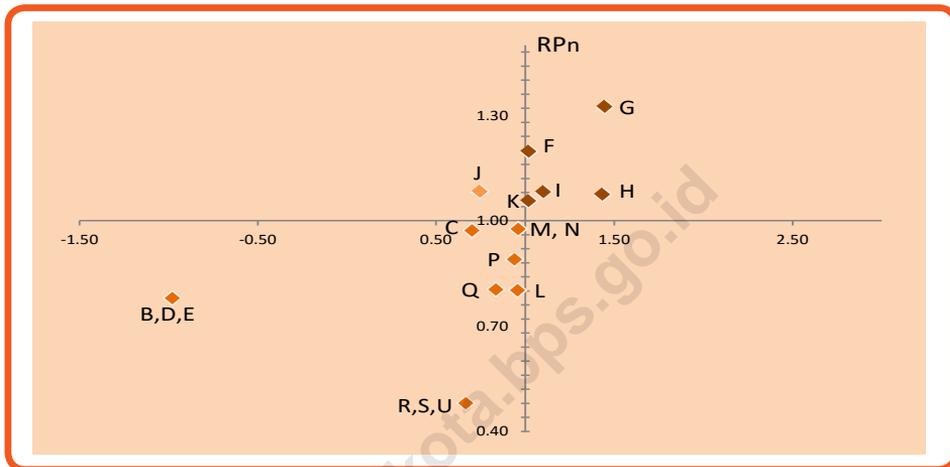
RP_{ip} = Rasio Pertumbuhan kategori I wilayah analisis p

RP_{in} = Rasio Pertumbuhan kategori I wilayah referensi n

Analisis MRP akan menyandingkan RP_{ip} dan RP_{in} suatu kategori lapangan usaha. Penyandingan nilai RP_{ip} dan RP_{in} tersebut ditampilkan dalam kuadran-kuadran. Adapun interpretasi yang dapat diambil dari hasil analisis MRP adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai RP_{ip} > 1 dan RP_{in} > 1 maka pertumbuhan sektor i di wilayah analisis dan wilayah referensi sama-sama tinggi, sektor tersebut merupakan potensi baik di tingkat regional maupun global (di level wilayah referensinya).
2. Jika nilai RP_{ip} > 1 dan RP_{in} < 1 maka pertumbuhan sektor i di wilayah analisis lebih tinggi dari wilayah referensi, sektor tersebut merupakan potensi di tingkat regional namun secara global tidak berpotensi.
3. Jika nilai RP_{ip} < 1 dan RP_{in} > 1 maka pertumbuhan sektor i di wilayah analisis lebih rendah dari wilayah referensi, sektor tersebut merupakan potensi di tingkat global namun secara regional tidak berpotensi.
4. Jika nilai RP_{ip} < 1 dan RP_{in} < 1 maka pertumbuhan sektor i di wilayah analisis dan wilayah referensi sama-sama rendah, sektor tersebut tidak berpotensi baik di tingkat regional maupun global (wilayah referensi)

Gambar 3.3
Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Tanjungpinang
dengan Wilayah Referensi Kepulauan Riau, 2016



Sumber: BPS, Hasil Olah PDRB Menurut Lapangan Usaha 2016

Hasil Analisis MRP yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat 5 (lima) kategori lapangan usaha yang memiliki nilai $RPp > 1$ dan $RPn > 1$. Dengan kata lain, terdapat 5 kategori lapangan usaha yang memiliki keunggulan dari sisi pertumbuhan ekonominya, baik di level Kota Tanjungpinang maupun level wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Kategori tersebut antara lain: Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (G); Pengangkutan dan pergudangan (H); Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum (I); Aktivitas Keuangan Dan Asuransi (K); dan Konstruksi (F).

Selain itu, tidak terdapat kategori lapangan usaha dengan nilai $RPp > 1$, tetapi $RPn < 1$. Dari hasil ini, menyatakan bahwa tidak terdapat kategori yang diindikasikan memiliki keunggulan komparatif di level Kota Tanjungpinang, tetapi tidak secara global di level wilayah Kepulauan Riau. Sebaliknya, terdapat 1 (satu) kategori lapangan usaha yang memiliki nilai $RPp < 1$, tetapi $RPn > 1$ kategori tersebut adalah Informasi Dan Komunikasi (J). Hasil ini menunjukkan Informasi dan Komunikasi merupakan lapangan usaha unggulan di level Kepulauan Riau, hanya saja tidak memiliki keunggulan komparatif di level Kota Tanjungpinang.

Terdapat 7 (tujuh) kategori lapangan usaha yang tidak memiliki keunggulan komparatif, baik khusus di level Tanjungpinang maupun di level wilayah Kepulauan Riau. Lapangan usaha tersebut adalah Pertambangan, Energi, Pengelolaan Air dan Limbah (B,D,E); Industri Pengolahan (C); Real Estat (L); Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis (M,N); Pendidikan (P); Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial (Q); Jasa Lainnya (R,S,U). Hal ini ditandai oleh nilai RPp maupun RPn yang kurang dari 1.

2.3 Analisis Shift Share (SS)

Shift Share merupakan salah satu teknik kuantitatif untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi suatu wilayah terhadap struktur ekonomi wilayah administratif yang lebih luas sebagai referensi. Dalam analisis *Shift Share* terdapat tiga macam rasio pertumbuhan, yaitu :

- *Regional Share* (RS) merupakan komponen share pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh faktor eksternal. RS dapat mengindikasikan adanya peningkatan kegiatan ekonomi suatu daerah akibat kondisi perekonomian global yang terjadi.
- *Proportional Shift* (PS) komponen pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh struktur ekonomi daerah tersebut yang baik, dengan berspesialisasi pada sektor yang pertumbuhannya cepat.
- *Differential Shift* (DS) merupakan komponen pertumbuhan ekonomi daerah karena kondisi spesifik daerah yang kompetitif. Unsur pertumbuhan ini merupakan keunggulan kompetitif daerah yang dapat mendorong pertumbuhan ekspor daerah.
- *Shift Share* (SS) merupakan penjumlahan dari *Regional Share* dengan *Proportional Share* dan *Differential Share*.

Rumus yang digunakan adalah:

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$$

di mana;

$$N_{ij} = E_{ij} * r_n$$

$$M_{ij} = E_{ij} (r_{in} - r_n)$$

$$C_{ij} = E_{ij} (r_{ij} - r_{in})$$

Keterangan :

D_{ij} = *Shift Share* wilayah analisis kategori ke-i

N_{ij} = *Regional Share* wilayah analisis kategori ke-i

M_{ij} = *Proportional Shift* wilayah analisis kategori ke-i

C_{ij} = *Differential Shift* wilayah analisis kategori ke-i

E_{ij} = PDRB wilayah analisis sektor ke-i tahun 2010.

r_n = Pertumbuhan Total PDRB wilayah referensi 2016 thd Total PDRB wilayah referensi 2010

r_{in} = Pertumbuhan PDRB wilayah referensi sektor ke-i tahun 2016 thd PDRB wilayah referensi sektor ke-i tahun 2010

r_{ij} = Pertumbuhan PDRB wilayah analisis sektor ke-i tahun 2016 thd PDRB wilayah analisis sektor ke-i tahun 2010

Hasil Analisis *Shift Share* dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Jika $Mij > 0$ tumbuh lebih cepat dari sektor yang sama di daerah lain /daerah referensi (secara umum)
- Jika $Cij > 0$ tumbuh lebih cepat dari sektor yang lain di daerah analisis (daya saing yang tinggi dibanding sektor lain)
- Jika $Mij > 0$ dan $Cij > 0$, artinya wilayah/sektor dengan pertumbuhan sangat pesat
- Jika $Mij < 0$ dan $Cij > 0$, artinya wilayah/sektor dengan pertumbuhan terhambat tetapi berkembang
- Jika $Mij > 0$ dan $Cij < 0$, artinya wilayah/sektor dengan pertumbuhan terhambat namun masih berpotensi
- Jika $Mij < 0$ dan $Cij < 0$, artinya wilayah/sektor dengan daya saing rendah dan peranan terhadap wilayah juga rendah

Adapun hasil Analisis *Shift Share* di Kota Tanjungpinang dengan wilayah referensi Kepulauan Riau tersaji dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Hasil Analisis Shift Share (SS) Tanjungpinang dengan Wilayah Referensi Kepulauan Riau, 2016

Kategori	Nij (Regional Share/RS)	Mij (Proportional Shift Share/PS)	Cij (Differential Shift/DS)	Dij (Shift Share/SS)
B,D,E	16,961.14	-3,742.07	-44,819.50	-31,600.43
C	33,577.20	-956.68	-12,653.69	19,966.83
F	143,260.09	28,265.76	+ -22,546.84	148,979.01
G	85,888.46	27,900.90	+ 3,952.99	+ 117,742.34
H	24,540.55	1,837.63	+ 3,095.01	+ 29,473.19
I	5,181.19	424.96	+ 286.61	+ 5,892.75
J	13,877.80	1,155.84	+ 2,814.11	+ 17,847.75
K	13,777.68	779.71	+ -803.62	13,753.77
L	14,074.15	-2,791.39	2,916.85	+ 14,199.61
M,N	60.18	-1.46	18.40	+ 77.12
P	16,749.26	-1,845.49	1,538.58	+ 16,442.34
Q	11,663.21	-2,291.03	202.39	+ 9,574.57
R,S,U	5,883.37	-3,056.62	277.40	+ 3,104.15
Jumlah	385,494.27	0.00	-1,203,112.67	-817,618.41

Sumber: BPS, Hasil Olah PDRB Menurut Lapangan Usaha 2016

Terlihat dari Tabel 3.1, terdapat 4 (empat) kategori lapangan usaha yang memiliki Mij dan Cij yang bernilai positif atau $Mij > 0$ dan $Cij > 0$. Hasil ini mengindikasikan bahwa 4 kategori tersebut merupakan kategori dengan pertumbuhan sangat pesat. Dengan demikian, berdasarkan Analisis *Shift Share* (SS), terdapat 4 kategori yang memiliki potensi untuk dikembangkan di Kota Tanjungpinang. Adapun keempat kategori tersebut diantaranya adalah Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor (G); Pengangkutan dan pergudangan (H); Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (I); dan Informasi dan Komunikasi (J).

2.4 Analisis Tipologi Klassen

Tipologi Klassen mendasarkan pengelompokan suatu sektor, subsektor, usaha atau komoditi daerah dengan cara membandingkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerah (atau nasional) yang menjadi acuan dan membandingkan pangsa sektor, subsektor, usaha, atau komoditi suatu daerah dengan nilai rata-ratanya di tingkat yang lebih tinggi (daerah acuan atau nasional). Hasil analisis Tipologi Klassen akan menunjukkan posisi pertumbuhan dan pangsa sektor, subsektor, usaha, atau komoditi pembentuk variabel regional suatu daerah. Tipologi Klassen dengan pendekatan sektoral (yang dapat diperluas tidak hanya di tingkat sektor tetapi juga subsektor, usaha ataupun komoditi) menghasilkan empat klasifikasi sektor dengan karakteristik yang berbeda sebagai berikut:

- Sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat (Kuadran I). Kuadran ini merupakan kuadran sektor dengan laju pertumbuhan PDRB (G_i) yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan daerah yang menjadi acuan (G) dan memiliki kontribusi terhadap PDRB (S_i) yang lebih besar dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi acuan (S). Klasifikasi ini biasa dilambangkan dengan G_i lebih besar dari G dan S_i lebih besar dari S . Sektor dalam kuadran I dapat pula diartikan sebagai sektor yang potensial karena memiliki kinerja laju pertumbuhan ekonomi dan pangsa yang lebih besar daripada daerah yang menjadi acuan.
- Sektor maju tapi tertekan (Kuadran II). Sektor yang berada pada kuadran ini memiliki nilai pertumbuhan PDRB (G_i) yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (G), tetapi memiliki kontribusi terhadap PDRB daerah (S_i) yang lebih besar dibandingkan kontribusi nilai sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (S). Klasifikasi ini biasa dilambangkan dengan G_i lebih kecil dari G dan S_i lebih besar dari S . Sektor dalam kategori ini juga dapat dikatakan sebagai sektoryang telah jenuh.
- Sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat (Kuadran III). Kuadran ini merupakan kuadran untuk sektor yang memiliki nilai pertumbuhan PDRB (G_i) yang lebih tinggi dari pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (G), tetapi kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB (S_i) lebih kecil dibandingkan nilai kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara

nasional (S). Klasifikasi ini biasa dilambangkan dengan G_i lebih besar dari G dan S_i lebih kecil dari S . Sektor dalam Kuadran III dapat diartikan sebagai sektor yang sedang booming. Meskipun pangsa pasar daerahnya relatif lebih kecil dibandingkan rata-rata nasional.

- Sektor relatif tertinggal (Kuadran IV). Kuadran ini ditempati oleh sektor yang memiliki nilai pertumbuhan PDRB (G_i) yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (G) dan sekaligus memiliki kontribusi tersebut terhadap PDRB (S_i) yang lebih kecil dibandingkan nilai kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (S).

Kontribusi Sektoral	Pertumbuhan Sektoral	
	$G_i \geq G$	$G_i < G$
$S_i \geq S$	Sektor unggulan dan tumbuh pesat (KW1)	Sektor unggulan tetapi pertumbuhannya tertekan (KW2)
$S_i < S$	Sektor potensial dan masih dapat dikembangkan (KW4)	Bukan sektor potensial dan tertinggal (KW3)

Keterangan:

- G_i : Pertumbuhan sektor i di wilayah analisis
- G : Pertumbuhan sektor i di wilayah referensi
- S_i : Kontribusi sektor i di wilayah analisis
- S : Kontribusi sektor i di wilayah referensi

Kategori lapangan usaha yang dianggap potensial ialah ketika kategori tersebut memenuhi kriteria memiliki pertumbuhan lebih tinggi daripada pertumbuhan kategori yang sama di level wilayah referensi dan memiliki kontribusi terhadap PDRB lebih tinggi daripada kontribusi kategori yang sama di level wilayah referensi; atau memenuhi salah satu diantaranya. Dengan kata lain, kategori lapangan usaha yang potensial di sebuah daerah menurut Analisis Tipologi Klassen ialah kategori yang masuk pada Kuadran 1, Kuadran 2, dan Kuadran 4.

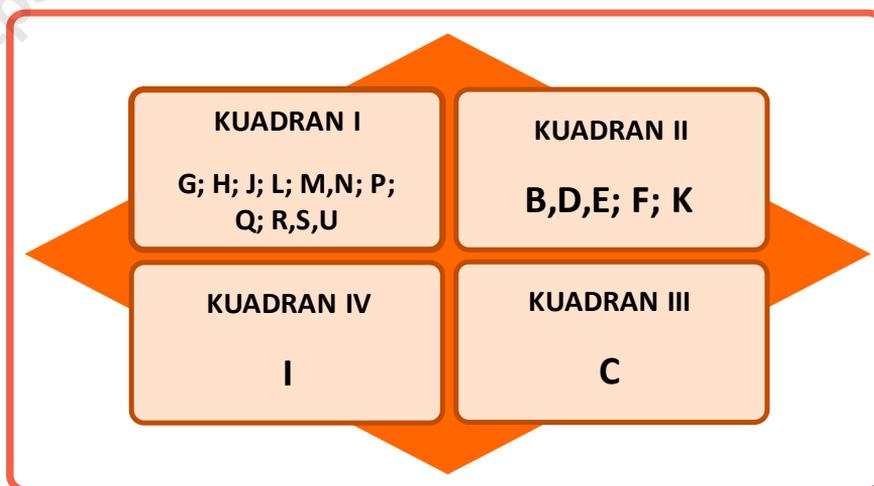
Adapun hasil dari Analisis Tipologi Klassen Kota Tanjungpinang dapat dilihat pada Tabel 3.2 dan dapat disusun dalam bentuk matriks yang membentuk 4 kuadran Tipologi Klassen pada Gambar 3.3.

Tabel 3.2
Hasil Analisis Tipologi Kelas Tanjungpinang dengan Wilayah Referensi Kepulauan Riau, 2016

Kategori	Pertumbuhan PDRB			Kontribusi PDRB			Kesimpulan
	Tanjungpinang	Kepulauan Riau		Tanjungpinang	Kepulauan Riau		
B,D,E	-87,75	36,71	x	29,67	17,58	✓	+
C	28,01	45,76	x	7,48	39,68	x	
F	48,98	56,39	x	37,51	19,07	✓	+
G	64,57	62,40	✓	26,96	8,87	✓	+
H	56,57	50,63	✓	7,66	3,47	✓	+
I	53,57	50,96	✓	1,41	2,14	x	+
J	60,58	51,02	✓	3,17	1,95	✓	+
K	47,02	49,77	x	3,61	2,84	✓	+
L	47,52	37,76	✓	3,58	1,56	✓	+
M,N	60,36	45,96	✓	0,02	0,00	✓	+
P	46,24	41,91	✓	4,22	1,44	✓	+
Q	38,67	37,85	✓	2,79	0,92	✓	+
R,S,U	24,85	22,63	✓	1,29	0,48	✓	+
Jumlah	-20,77	47,10		100,00	100,00		

Sumber: BPS, Hasil Olah PDRB Menurut Lapangan Usaha 2016

Gambar 3.4
Pola dan Karakteristik Tanjungpinang dengan Wilayah Referensi Kepulauan Riau, 2016



Sumber: BPS, Hasil Olah PDRB Menurut Lapangan Usaha 2016

Analisis Tipologi Klassen yang dilakukan menunjukkan terdapat 8 (delapan) kategori lapangan usaha berada pada Kuadran I, yakni Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (G); Pengangkutan dan pergudangan (H); Informasi dan Komunikasi (J); Real Estat (L); Jasa Perusahaan (M,N); Pendidikan (P); Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial (Q); dan Jasa Lainnya (R,S,U). Hal ini dapat diartikan bahwa delapan kategori tersebut merupakan lapangan usaha yang maju dan tumbuh dengan pesat di Kota Tanjungpinang. Kesimpulan ini didukung oleh tidak hanya laju pertumbuhan delapan lapangan usaha tersebut yang melebihi laju pertumbuhan di level Kepulauan Riau, tetapi kontribusi terhadap PDRB Tanjungpinang juga lebih besar dibandingkan kontribusi terhadap perekonomian Kepulauan Riau secara global. Kondisi ini menunjukkan bahwa delapan kategori ini merupakan lapangan usaha yang potensial di Tanjungpinang.

Selain itu, Tanjungpinang juga memiliki kategori-kategori lain yang juga berpotensi untuk dikembangkan baik karena memiliki kelebihan dari sisi laju pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan kategori yang sama di wilayah Kepulauan Riau (Kuadran II), maupun kategori yang memiliki kontribusi lebih besar dibandingkan dengan kontribusi kategori tersebut terhadap perekonomian di wilayah Kepulauan Riau secara keseluruhan (Kuadran IV). Kategori-kategori yang termasuk golongan ini antara lain: Pertambangan, Energi, Pengelolaan Air dan Limbah (B,D,E); Konstruksi (F); Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (I); dan Aktivitas Keuangan Dan Asuransi (K).

2.5 Analisis Overlay

Analisis Overlay pada dasarnya menyandingkan hasil identifikasi potensi-potensi ekonomi dari beberapa alat analisis lainnya. Dalam buku ini, Analisis *Overlay* menyandingkan hasil dari Analisis Location Quotient (LQ), Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP), Analisis *Shift Share* (SS), dan Analisis Tipologi Klassen. Penyandingan ini ditujukan agar pemilihan kategori lapangan usaha yang potensial lebih akurat karena mempertimbangkan beberapa kriteria analisis. Adapun hasil Analisis *Overlay* tersaji dalam table 3.3.

Tabel 3.2
Hasil Analisis Tipologi Klassen Tanjungpinang dengan Wilayah
Referensi Kepulauan Riau, 2016

Kategori	LQ	MRP		Shift Share		Klassen	Kesimpulan
		RP _p	RP _n	PS _{ij}	DS _{ij}		
B,D,E	-	-	-	-	-	Kw II	-
C	-	-	-	-	-	Kw IV	-
F	+	+	+	+	-	Kw II	Unggulan
G	+	+	+	+	+	Kw I	Unggulan
H	-	+	+	+	+	Kw I	Potensial
I	+	+	+	+	+	Kw III	Unggulan
J	+	-	+	+	+	Kw I	Unggulan
K	+	+	+	+	-	Kw II	Unggulan
L	+	-	-	-	+	Kw I	Unggulan
M,N	+	-	-	-	+	Kw I	Unggulan
P	+	-	-	-	+	Kw I	Unggulan
Q	+	-	-	-	+	Kw I	Unggulan
R,S,U	+	-	-	-	+	Kw I	Unggulan

Sumber: BPS, Hasil Olah PDRB Menurut Lapangan Usaha 2016

Hasil Analisis *Overlay* menunjukkan bahwa Tanjungpinang memiliki 10 (sepuluh) lapangan usaha yang bersifat unggulan. Ada beberapa kategori yang merupakan unggulan baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun nilai tambah serta pertumbuhan yang pesat, yakni Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (G) dan Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (I).

Kategori Konstruksi (F) dan Aktivitas Keuangan dan Asuransi (K) merupakan lapangan usaha yang memiliki keunggulan dalam penyerapan tenaga kerja dengan pertumbuhan yang terhambat tetapi berkembang serta memiliki potensi yang baik di level Kota Tanjungpinang maupun di wilayah Kepulauan Riau.

Kategori Informasi dan Komunikasi (J) memiliki keunggulan dalam penyerapan tenaga kerja serta memiliki potensi di wilayah Kepulauan Riau namun tidak berpotensi di wilayah Kota Tanjungpinang.

Terdapat 5 (lima) kategori yang memiliki keunggulan dalam penyerapan tenaga kerja dengan pertumbuhan terhambat tetapi berkembang, yaitu Real Estat (L); Jasa Perusahaan (M,N); Pendidikan (P); Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial (Q); dan Jasa Lainnya (R,S,U).

kategori yang memiliki potensi baik di Kota Tanjungpinang maupun di wilayah Kepulauan Riau dengan pertumbuhan yang pesat namun tidak memiliki keunggulan dalam penyerapan tenaga kerja adalah kategori Pengangkutan dan pergudangan (H).

Beberapa dari 10 kategori lapangan usaha ini selanjutnya akan dibahas lebih detail di bagian selanjutnya. Di sisi lain, kategori lainnya yang bersifat potensial akan diulas lebih lanjut dalam sebuah bagian khusus pada bab berikutnya.

<https://tanjungpinangkota.bps.go.id>

bab

4



Perdagangan Besar dan Eceran Sebagai Primadona Ekonomi Tanjungpinang

Perdagangan Besar dan Eceran Sebagai Primadona Ekonomi Tanjungpinang

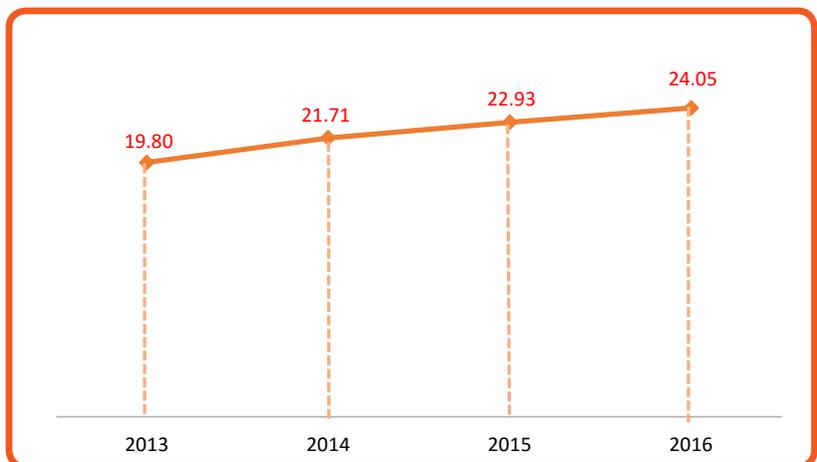
1. Peranan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran Dalam Perekonomian Kota Tanjungpinang

Kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Penjualan tanpa perubahan teknis juga mengikutkan kegiatan yang terkait dengan perdagangan, seperti penyortiran, pemisahan kualitas dan penyusunan barang, pencampuran, pengepakan, pembongkaran dari ukuran besar dan pengepakan ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, pengudangan.

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan kategori yang memiliki kontribusi yang besar terhadap PDRB Kota Tanjungpinang selama periode 2012 hingga 2016.

Gambar 4.1

Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Tanjungpinang (Persen), 2013 – 2016



Sumber: BPS, Hasil Olah PDRB Menurut Lapangan Usaha 2013-2016

Gugusan pulau-pulau di Kepulauan Riau yang berada pada wilayah strategis antara Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan mendorong wilayah ini menjadi salah satu sentra perdagangan. Tanjungpinang sebagai daerah otonom kota yang berbatasan langsung dengan Kota Batam dan Kabupaten Bintan merupakan salah satu pintu masuk bagi kegiatan perdagangan, baik domestik maupun internasional.

Tercatat bahwa Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor ini memiliki kontribusi terbesar kedua setelah Konstruksi. Kontribusinya juga terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Pada tahun 2013 kontribusinya hanya sebesar 19,80 persen dan ditahun 2016 menjadi sebesar 24,05 persen.

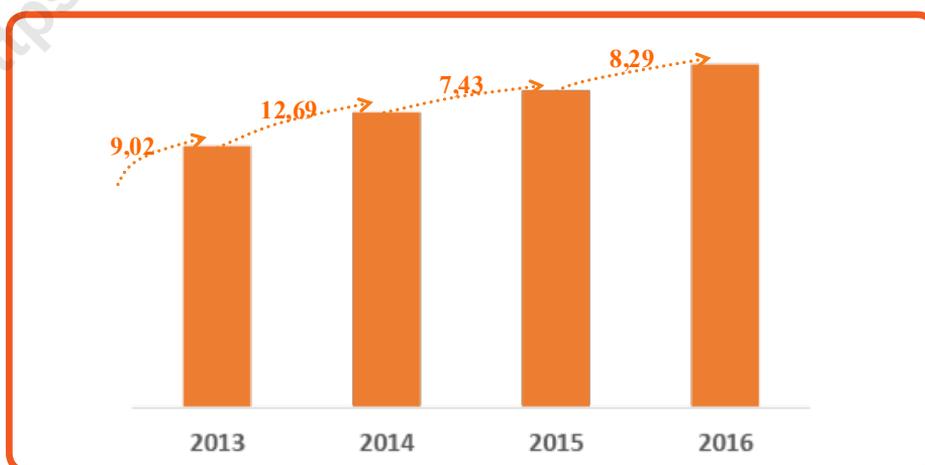
Perkembangan laju pertumbuhan lapangan usaha Perdagangan Besar dan

Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor diilustrasikan pada Gambar 4.2. Pada grafik tersebut terlihat bahwa lapangan usaha ini terus mengalami pertumbuhan kearah positif selama periode 2013-2016. Pertumbuhan tertinggi diperlihatkan terjadi pada tahun 2014 sebesar 12,69 persen, sempat mengalami perlambatan ditahun 2015 dengan pertumbuhan sebesar 7,43 persen hal ini dikarenakan peningkatan nilai PDRB pada tahun sebelumnya lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ditahun 2015. Namun ditahun 2016 kembali terjadi percepatan mencapai 8,29 persen.

Perkembangan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tidak lepas dari arah pembangunan Kota Tanjungpinang yang tertuang dalam RPJMD Kota Tanjungpinang 2013-2018 yaitu terwujudnya Kota Tanjungpinang sebagai kota perdagangan barang dan jasa yang berwawasan lingkungan.

Gambar 4.2

Laju Pertumbuhan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Tanjungpinang (Persen), 2013-2016



Sumber: BPS, Hasil Olah PDRB Menurut Lapangan Usaha 2013-2016

2. Keunggulan Perdagangan Besar dan Eceran dalam Menciptakan Lapangan Usaha dan Penyerapan Tenaga Kerja

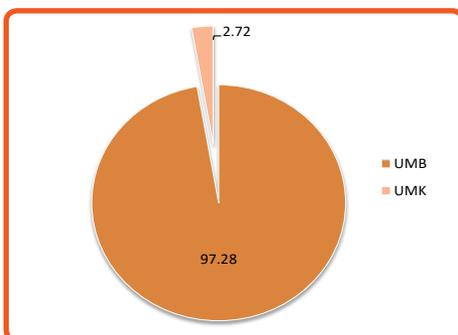
Berdasarkan kajian potensi wilayah dengan menggunakan instrumen Location Quotient (LQ), Shiftshare, Model Rasio Pertumbuhan (MRP), dan Tipologi Klassen, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor menjadi andalan di Kota Tanjungpinang sudah searah dengan data baik dari sisi PDRB, jumlah usaha, maupun penyerapan tenaga kerjanya.

Dari data SE2016-L, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor di Kota Tanjungpinang berkontribusi sekitar 39 persen dalam menciptakan lapangan usaha dan sekitar 28 persen dalam menyerap tenaga kerja (Gambar 4.4). Ketersediaan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan dan bandara yang lebih lengkap dengan kapasitas yang lebih tinggi dari Kabupaten lain di Kepulauan Riau ikut mendorong intensitas perdagangan di Kota Tanjungpinang.

Untuk mewujudkan Kota Tanjungpinang sebagai sentra perdagangan memiliki tantangan yang cukup besar. Usaha-usaha di kategori Perdagangan mayoritas adalah Usaha Mikro Kecil (UMK) yang mencapai lebih dari 97 persen (Gambar 4.3).

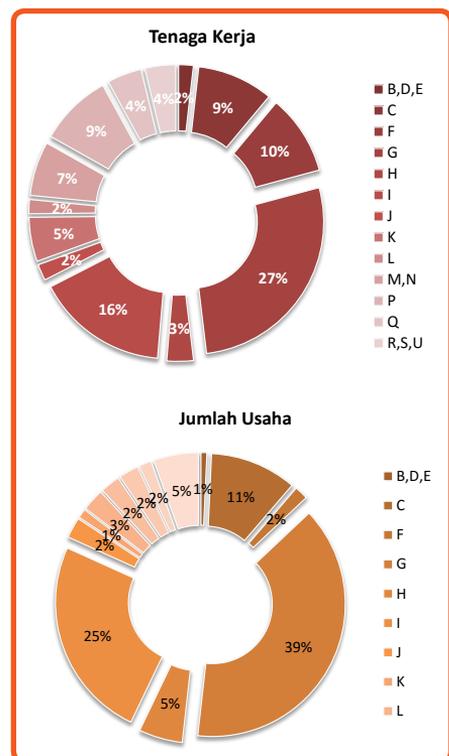
Jika dilihat rata-rata jumlah tenaga kerja perperusahaan hanya ada 2 orang (Tabel 4.1). Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata usaha pada lapangan usaha ini berskala kecil.

Gambar 4.3
Pesentase Usaha Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Tanjungpinang Menurut Skala Usaha, 2016



Sumber: BPS, Hasil SE2016 Listing

Gambar 4.4
Kontribusi Usaha dan Tenaga Kerja di Kota Tanjungpinang Menurut Kategori Usaha, 2016



Sumber: BPS, Hasil SE2016 Listing

Posisi Tanjungpinang merupakan wilayah yang sangat potensial bagi kegiatan perdagangan domestik dan internasional. Meskipun kontribusi dalam menciptakan PDRB Provinsi Kepulauan Riau dan menyediakan lapangan usaha masih lebih rendah dibandingkan dengan Kota Batam. Sektor ini memiliki potensi yang cukup besar untuk pengembangan ke depan baik ditingkat regional maupun global. Tercatat kontribusi penciptaan lapangan usaha ini terhadap Kepulauan Riau hanya sebesar 11,66 persen dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 11,40 persen (Tabel 4.1).

Dari hasil pendaftaran usaha/perusahaan SE 2016 terlihat bahwa persebaran usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor terbanyak berada di Kecamatan Tanjungpinang Timur sebesar 38,42 persen. Begitu pula dengan persebaran jumlah tenaga kerja yang terserap terbanyak terdapat di kecamatan Tanjungpinang Timur sebesar 42,16 persen. Persebaran usaha/perusahaan Perdagangan Besar dan eceran, Reparasi dan perawatan Mobil dan Sepeda Motor terbanyak kedua terdapat di Kecamatan Bukit Bestari sebesar 22,96 persen dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 23,61 persen.

Tabel 4.1
Jumlah Usaha/Perusahaan dan Tenaga Kerja Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor di Tanjungpinang menurut Kecamatan, 2016

Kecamatan	Usaha/Perusahaan		Tenaga Kerja		Rata-rata Jumlah Tenaga Kerja per Perusahaan
	Jumlah	% Terhadap Kota Tanjungpinang	Jumlah	% Terhadap Kota Tanjungpinang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bukit Bestari	1 746	22,96	3 865	23,61	2
Tanjungpinang Timur	2 921	38,42	6 901	42,16	2
Tanjungpinang Kota	1 589	20,90	3 108	18,99	2
Tanjungpinang Barat	1 347	17,72	2 493	15,23	2
Kota Tanjungpinang	7 603	11,66*	16 367	11,40*	2
Kepulauan Riau	65 203	100,00*	143 580	100,00*	2

Catatan: * Persentase terhadap Kepulauan Riau

Sumber: BPS, Hasil SE2016 Listing

<https://tanjungpinangkota.bps.go.id>

bab 5



Penyediaan
Akomodasi dan
Penyediaan Makan
Minum Potensi Ekonomi
Baru Tanjungpinang

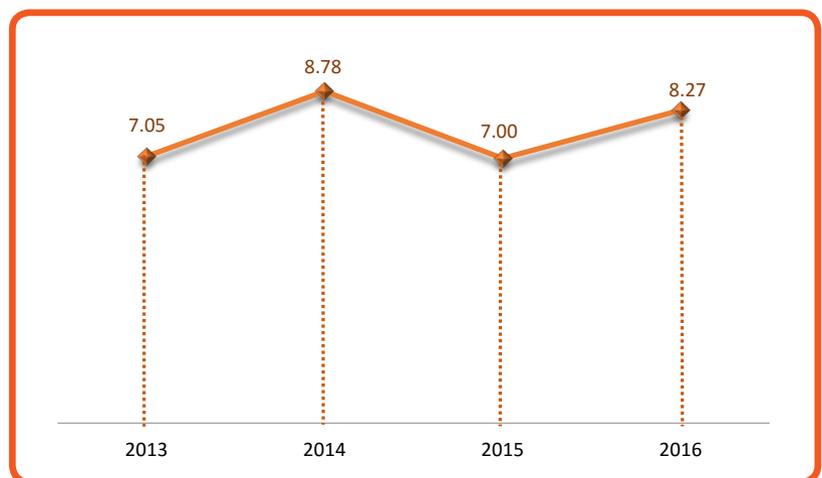
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum Potensi Ekonomi Baru Tanjungpinang

1. Potensi Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum dalam Pengembangan Ekonomi Tanjungpinang

Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum memiliki cakupan sebagai lapangan usaha penyedia akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyedia makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Adapun kegiatan penyediaan akomodasi yang dimaksud merupakan akomodasi jangka pendek untuk pengunjung ataupun pelancong; termasuk juga penyediaan akomodasi yang lebih lama untuk pelajar, pekerja, dan sejenisnya (seperti asrama atau rumah kost dengan makan maupun tidak dengan makan). Sementara itu, kegiatan penyediaan makan minum memiliki batasan berupa pelayanan makan minum yang menyediakan makanan atau minuman untuk dikonsumsi segera, baik restoran tradisional, restoran *self service* atau restoran *take away*, baik di tempat tetap maupun sementara

Gambar 5.1

Pertumbuhan Kategori Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum Tanjungpinang (Persen), 2016



Sumber: BPS, Hasil Olah PDRB Menurut Lapangan Usaha 2013-2016

dengan atau tanpa tempat duduk. Yang dimaksud penyediaan makanan dan minuman adalah penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi segera berdasarkan pemesanan.

Kinerja perekonomian dari lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum yang digambarkan melalui laju pertumbuhannya dapat dikatakan sangat baik. Selama periode 2013-2016, laju pertumbuhan lapangan usaha ini selalu bernilai positif (Gambar 5.1). Hal ini menunjukkan bahwa nilai PDRB yang dihasilkan oleh Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum mengalami peningkatan pada tahun 2016. Bukan hanya itu, laju pertumbuhan juga memiliki kecenderungan untuk terus naik. Artinya, peningkatan nilai PDRB yang dihasilkan memiliki nilai yang lebih besar daripada peningkatan yang terjadi pada tahun sebelumnya. Kondisi ini tentu menunjukkan bahwa Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum memang merupakan salah satu lapangan usaha unggulan yang dapat diandalkan dalam perekonomian Kota Tanjungpinang.

Dengan melihat kontribusi penciptaan lapangan usaha serta penyerapan tenaga kerja kategori Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum Tanjungpinang terhadap komposisi wilayah Kepulauan Riau, mengindikasikan adanya potensi ditingkat Kota Tanjungpinang maupun wilayah Kepulauan Riau dan memiliki keunggulan dalam penyerapan tenaga kerja pada level regional. Sesuai dengan target pembangunan Kota

Tabel 5.1
Jumlah Usaha/Perusahaan dan Tenaga Kerja Kategori Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum di Tanjungpinang menurut Kecamatan, 2016

Kecamatan	Usaha/Perusahaan		Tenaga Kerja		Rata-rata Jumlah Tenaga Kerja per Perusahaan
	Jumlah	% Terhadap Kota Tanjungpinang	Jumlah	% Terhadap Kota Tanjungpinang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bukit Bestari	1 426	29,51	2 814	29,14	2
Tanjungpinang Timur	1 743	36,06	3 398	35,19	2
Tanjungpinang Kota	555	11,48	1 398	14,48	3
Tanjungpinang Barat	1 109	22,95	2 046	21,19	2
Kota Tanjungpinang	4 833	13,76*	9 656	11,53*	2
Kepulauan Riau	35 118	100,00*	83 722	100,00*	2

Catatan: * Persentase terhadap Kepulauan Riau

Sumber: BPS, Hasil SE2016 Listing

Tanjungpinang yang tertuang dalam tujuan misi ke 6 (enam) RPJMD Kota Tanjungpinang 2013-2018 yaitu mengembangkan potensi pariwisata dan budaya daerah dengan sasaran meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung kepariwisataan.

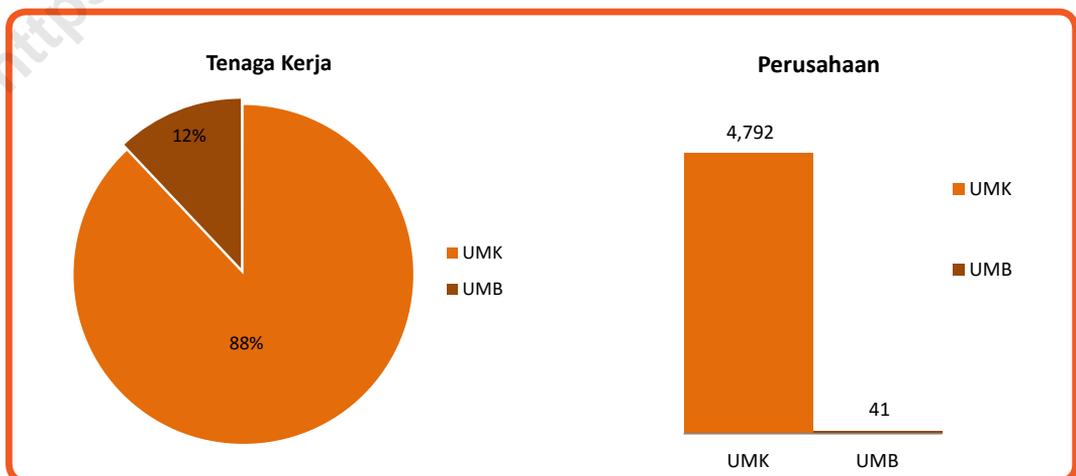
Aktivitas ekonomi yang dapat mendukung perkembangan dunia pariwisata diantaranya meningkatkan nilai tambah pada lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum.

Dari sisi jumlah usaha, Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum merupakan lapangan usaha yang memiliki jumlah usaha/ perusahaan terbanyak kedua di Kota Tanjungpinang.

Hasil Pendaftaran usaha/perusahaan SE2016 mencatat usaha yang bergerak di Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum terdapat sebanyak 4.833 usaha. Secara umum, Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum juga menjadi lapangan usaha dengan jumlah usaha terbanyak kedua setelah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor pada level Kota Tanjungpinang, dan kontribusi terbesar kedua diwilayah Kepulauan Riau setelah Kota Batam yakni sebesar 13,76 persen.

Tumbuh suburnya usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum ditengarai disebabkan oleh kemudahan dalam mendirikan usaha. Selain itu, makanan dan minuman yang merupakan kebutuhan pokok manusia sehingga lapangan usaha ini dinilai memiliki peluang yang besar di masyarakat.

Gambar 5.2
Jumlah Usaha/Perusahaan dan Persentase Tenaga Kerja Kategori Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum di Tanjungpinang menurut Skala Usaha, 2016

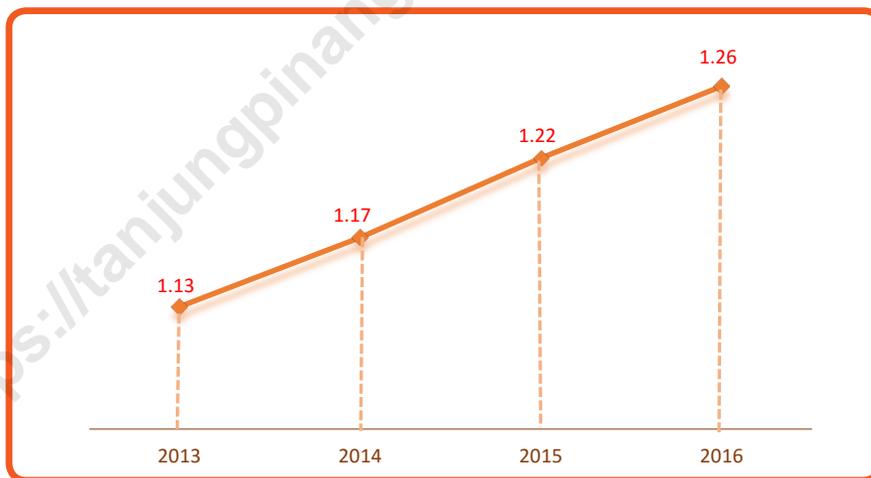


Sumber: BPS, Hasil SE2016 Listing

2. Kontribusi dan Peluang Kategori Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum dalam Perekonomian Tanjungpinang

Meskipun kategori Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum masih belum mampu memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian Kota Tanjungpinang yang tergambarkan dalam distribusi terhadap pembentukan nilai tambah, namun berdasarkan analisis menggunakan metode *Shift Share* dan *Tipologi Klassen* merupakan lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan yang pesat. Terlihat juga dari distribusinya terhadap pembentukan PDRB Kota Tanjungpinang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (Gambar 5.3), artinya ada peluang dalam pengembangan kategori Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum di wilayah Kota Tanjungpinang. Selama periode 2013-2016 kontribusinya meningkat 0,13 poin.

Gambar 5.3
Kontribusi Kategori Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum dalam Pembentukan PDRB di Tanjungpinang (Persen), 2016



Sumber: BPS, Hasil Olah PDRB Menurut Lapangan Usaha 2013-2016

Usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum telah tersebar merata di semua kecamatan di Kota Tanjungpinang. Sekitar 36,06 persen usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum yang ada di Kota Tanjungpinang terdapat di Kecamatan Tanjungpinang Timur dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 35,19 persen. Lapangan usaha ini juga telah banyak menjamur di Kecamatan Bukit Bestari, yaitu mencapai 29,51 persen, penyerapan tenaga kerja mencapai 29,14 persen.

Kota Tanjungpinang merupakan salah satu pintu masuknya wisatawan dari luar negeri. Kondisi ini merupakan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan dan mengoptimalkan potensi lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum agar wisatawan yang berkunjung dapat *stay* lebih lama di Kota Tanjungpinang serta meningkatkan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) yang nantinya akan berdampak pada peningkatan nilai tambah pada Sub Kategori Penyediaan Akomodasi.

Perkembangan kunjungan wisatawan mancanegara mengalami peningkatan pada tahun 2016 dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang masuk melalui Tanjungpinang pada tahun 2016 mencapai 2,27 persen, yang selama empat tahun terakhir sempat mengalami penurunan. Penurunan kunjungan wisatawan mancanegara tertinggi terjadi di tahun 2015 mencapai minus 7,07 persen. Dengan peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ditahun 2016 diharapkan ke depan kepariwisataan Kota Tanjungpinang ikut memberikan kontribusi yang lebih besar pada Kategori Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum.

Peluang sektor pariwisata sebagai penyumbang nilai tambah di Tanjungpinang akan nyata jika pemerintah menjalankan misi dalam RPJMD. Pariwisata merupakan kegiatan yang sangat strategis baik dari sisi ekonomi maupun budaya. Selain mendorong terciptanya lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat.



bab

6



Keunggulan Komparatif Sektor Konstruksi Dalam Perekonomian Tanjungpinang

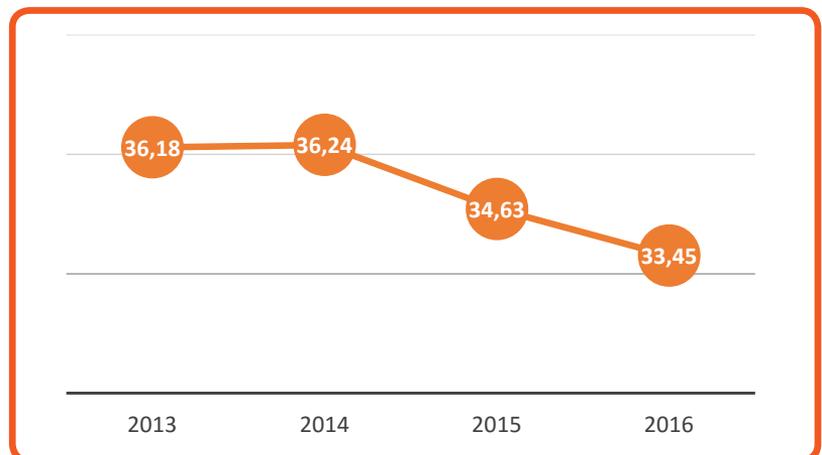
Keunggulan Komparatif Sektor Konstruksi Dalam Perekonomian Tanjungpinang

1. Peranan Konstruksi dalam Perekonomian Kota Tanjungpinang

Kategori Konstruksi merupakan kegiatan usaha di bidang konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan gedung dan bangunan sipil, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian prafabrikasi bangunan atau struktur di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara. Kegiatan konstruksi dilakukan baik oleh kontraktor umum, yaitu perusahaan yang melakukan pekerjaan konstruksi untuk pihak lain, maupun oleh kontraktor khusus, yaitu unit usaha atau individu yang melakukan kegiatan konstruksi untuk dipakai sendiri.

Konstruksi merupakan lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar dibandingkan kategori lainnya dalam pembentukan PDRB Kota Tanjungpinang selama periode 2013-2016.

Gambar 6.1
Kontribusi Konstruksi terhadap PDRB Kota Tanjungpinang (Persen), 2013-2016



Sumber: BPS, Hasil Olah PDRB Menurut Lapangan Usaha 2013-2016

Pembangunan infrastruktur yang cukup intensif di Kota Tanjungpinang sebagai pusat pemerintahan kota dan provinsi mengakibatkan jumlah perusahaan konstruksi berkembang lebih cepat dari wilayah lainnya. Persentase PDRB sektor ini pada tahun 2016 mencapai 33,45 persen terhadap PDRB Kota Tanjungpinang (Gambar 6.1).

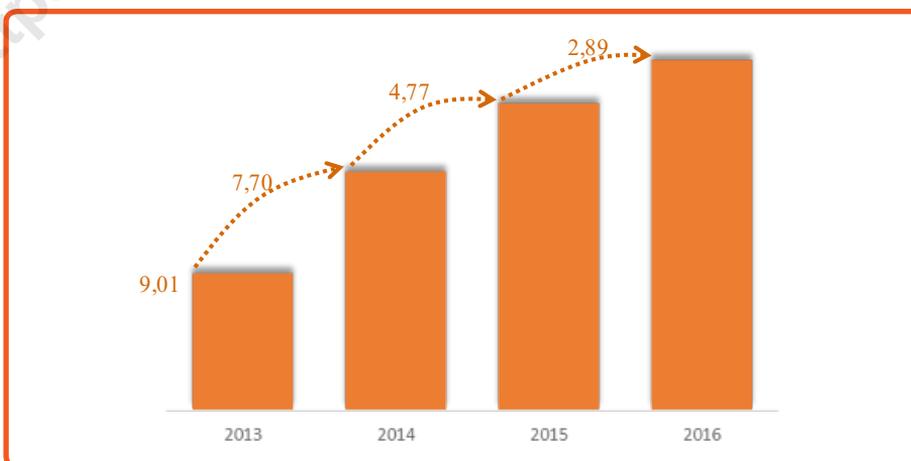
Saat ini, pembangunan infrastruktur untuk menunjang pengembangan ekonomi di Kota Tanjungpinang sedang digenjut oleh Pemerintah. Proyek-proyek tersebut meliputi penambahan pelabuhan, pengembangan bandara, saluran irigasi, jembatan, jalan dan lain-lain.

Berbagai percepatan proyek infrastruktur tersebut akan lebih menguatkan Sektor Konstruksi. Sistem jalan yang berkualitas akan meningkatkan aktivitas ekonomi dan mendistribusikan hasil produksi, serta meningkatkan pendapatan. Namun sebaliknya, prasarana jalan yang minim dan buruk akan menjadi hambatan dalam mengembangkan perekonomian. Sistem jalan yang tidak memadai justru dapat menjadi penghambat aktivitas ekonomi.

Oleh sebab itu, pengadaan infrastruktur jalan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah karena pengaruhnya terhadap aktivitas ekonomi lainnya seperti Perdagangan Besar dan Eceran (Kategori G); Transportasi dan Pergudangan (Kategori H), dan aktivitas yang berkaitan dengan jasa lainnya.

Perkembangan laju pertumbuhan lapangan usaha Konstruksi diilustrasikan pada Gambar 6.2. Grafik yang tersaji pada gambar menunjukkan adanya kecenderungan menurun dari tahun 2013 hingga 2016 dengan dari laju pertumbuhan sebesar 9,01 persen tahun 2013

Gambar 6.2
Laju Pertumbuhan PDRB Konstruksi Kota Tanjungpinang (Persen)
2013-2016



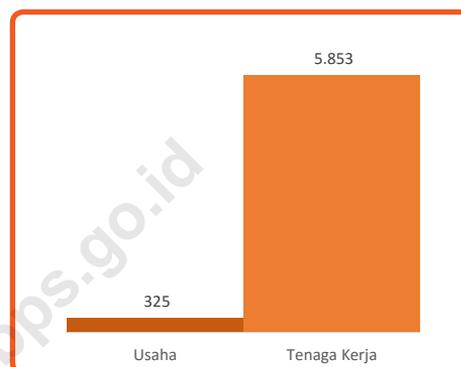
Sumber: BPS, Hasil Olah PDRB Menurut Lapangan Usaha 2013-2016

menjadi 2,89 persen tahun 2016. Penurunan nilai laju pertumbuhan ini bukan berarti nilai PDRB Konstruksi menurun, melainkan menunjukkan adanya perlambatan pertumbuhan atau peningkatan nilai PDRB yang terjadi pada tahun sebelumnya lebih tinggi dibandingkan peningkatan nilai PDRB yang terjadi pada tahun ini.

Konstruksi merupakan keunggulan ekonomi Tanjungpinang dapat terpotret dari kontribusi yang besar dari PDRB Kota Tanjungpinang. Selain itu, kategori ini mampu menyerap tenaga kerja relatif banyak, mencapai 9,76 persen dari total tenaga kerja di Kota Tanjungpinang atau sebanyak 5.853 orang, dengan jumlah usaha/perusahaan konstruksi sebanyak 325 usaha (Gambar 6.3).

Keunggulan Kategori Konstruksi dalam penyerapan tenaga kerja sangat tinggi,

Gambar 6.3
Jumlah Usaha dan Tenaga Kerja Kategori Konstruksi di Tanjungpinang, 2016



Sumber: BPS, Hasil SE2016 Listing

pada Tabel 6.1 terlihat bahwa setiap 1 (satu) usaha konstruksi mampu menyerap sekitar 18 tenaga kerja di Kota Tanjungpinang, sedangkan di level Provinsi penyerapannya mencapai 21 tenaga kerja.

Tabel 6.1
Jumlah Usaha/Perusahaan dan Tenaga Kerja Kategori Konstruksi di Tanjungpinang menurut Kecamatan, 2016

Kecamatan	Usaha/Perusahaan		Tenaga Kerja		Rata-rata Jumlah Tenaga Kerja per Perusahaan
	Jumlah	% Terhadap Kota Tanjungpinang	Jumlah	% Terhadap Kota Tanjungpinang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bukit Bestari	75	23,08	1403	23,97	19
Tanjungpinang Timur	175	53,85	2810	48,01	16
Tanjungpinang Kota	15	4,62	339	5,79	23
Tanjungpinang Barat	60	18,46	1301	22,23	22
Kota Tanjungpinang	325	16,93*	5853	14,81*	18
Kepulauan Riau	1.920	100,00*	39.515	100,00*	21

Catatan: * Persentase terhadap Kepulauan Riau

Sumber: BPS, Hasil SE2016 Listing

Usaha/perusahaan Konstruksi sebagian besar berada di Kecamatan Tanjungpinang Timur yakni lebih dari 50 persen dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 48 persen (Tabel 6.1). Banyaknya usaha konstruksi yang berkembang di kecamatan ini dikarenakan wilayah Kecamatan Tanjungpinang Timur yang lebih luas dibandingkan kecamatan lainnya sehingga banyak pengembang yang membangun infrastruktur seperti pembangunan jalan dan rumah tempat tinggal. Usaha Konstruksi juga banyak terdapat di Kecamatan Bukit Bestari sebesar 23 persen dengan penyerapan tenaga kerjanya juga sekitar 24 persen.

2. Karakteristik Usaha Konstruksi Tanjungpinang

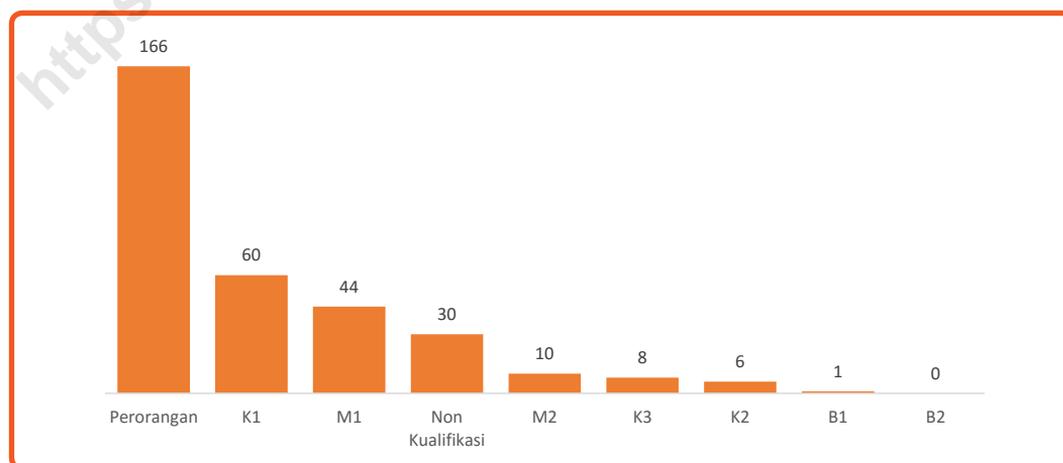
Usaha Konstruksi dapat dibedakan berdasarkan kualifikasi khusus. Kualifikasi Usaha/Perusahaan Konstruksi yang dimaksud adalah penggolongan perusahaan konstruksi menurut kemampuan melaksanakan pekerjaan berdasarkan kriteria resiko, dan/ atau kriteria penggunaan teknologi, dan/ atau kriteria besaran biaya. Adapun kualifikasi ini membedakan usaha/ perusahaan Konstruksi menjadi 9 kualifikasi, diantaranya:

- Perorangan: Batas nilai satu pekerjaan ≤ 300 juta
- K1 : Batas nilai satu pekerjaan ≤ 1 Milyar
- K2 : Batas nilai satu pekerjaan $\leq 1,75$ Milyar
- K3 : Batas nilai satu pekerjaan $\leq 2,5$ Milyar
- M1 : Batas nilai satu pekerjaan ≤ 10 Milyar

- M2 : Batas nilai satu pekerjaan ≤ 300 juta
- B1 : Batas nilai satu pekerjaan ≤ 1 Milyar
- B2 : Batas nilai satu pekerjaan $\leq 1,75$ Milyar
- Non : Masa berlaku sertifikat LPJK kadaluarsa Kualifikasi

Gambar 6.4

Jumlah Usaha Konstruksi Kota Tanjungpinang Menurut Kode Kualifikasi Usaha, 2016



Sumber: BPS, Hasil SE2016 Listing

Hasil pendaftaran usaha SE2016 mencatat terdapat 325 usaha/ perusahaan yang bergerak pada lapangan usaha Konstruksi di Kota Tanjungpinang. Gambar 6.4 mengilustrasikan usaha Konstruksi Tanjungpinang berdasarkan kualifikasinya. Secara kasat mata, terlihat bahwa usaha Konstruksi Tanjungpinang didominasi oleh usaha dengan karakteristik batas nilai pekerjaan tidak terlalu besar.

Dari seluruh usaha tersebut, usaha Konstruksi perorangan merupakan usaha konstruksi paling banyak, yakni sebanyak 166 usaha. Selanjutnya, usaha konstruksi di Kota Tanjungpinang didominasi oleh usaha Konstruksi yang memiliki kualifikasi K1. Jumlah usaha Konstruksi yang memiliki kualifikasi ini terdapat sebanyak 60 usaha. Sementara itu, usaha konstruksi dengan kualifikasi yang lebih besar seperti B1 maupun B2 masih terbilang jarang di Kota Tanjungpinang. Dari Hasil Pendaftaran Usaha/Perusahaan SE2016, Usaha Konstruksi dengan kualifikasi B1 hanya terdapat 1 usaha dan tidak ada Usaha Konstruksi dengan kualifikasi B2.

<https://tanjungpinangkota.bps.go.id>



bab

7



Aktivitas Keuangan dan Asuransi Sebagai Penyokong Perekonomian Tanjungpinang

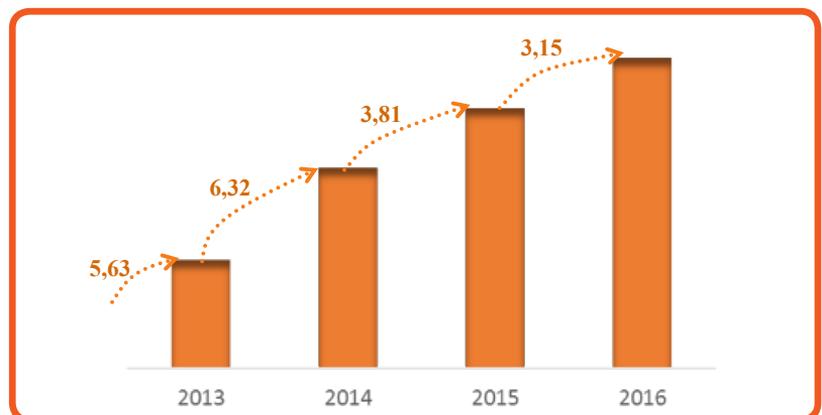
Aktivitas Keuangan dan Asuransi Sebagai Penyokong Perekonomian Tanjungpinang

1. Perkembangan Aktivitas Keuangan dan Asuransi Tanjungpinang

Kategori ini mencakup jasa perantara keuangan, asuransi dan pensiun, jasa keuangan lainnya serta jasa penunjang keuangan. Kategori ini juga mencakup kegiatan pemegang asset, seperti kegiatan perusahaan holding dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis.

Kegiatan Jasa Perantara Keuangan antara lain bank sentral, perbankan konvensional maupun syariah, baik bank pemerintah pusat dan daerah, bank swasta nasional, bank campuran dan asing, dan bank perkreditan rakyat, juga koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, baitul maal wantanwil dan jasa perantara moneter lainnya. Sementara itu, Asuransi dan dana pensiun mencakup penjaminan tunjangan hari tua serta polis asuransi, dimana premi tersebut diinvestasikan untuk digunakan terhadap klaim yang akan datang. Sub kategori terakhir pada lapangan usaha Aktivitas

Gambar 7.1
Pertumbuhan Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Tanjungpinang (Persen), 2013-2016



Sumber: BPS, Hasil Olah PDRB Menurut Lapangan Usaha 2013-2016

Keuangan dan Asuransi adalah Jasa keuangan lainnya, meliputi kegiatan jasa keuangan yang mencakup kegiatan leasing, kegiatan pemberian pinjaman oleh lembaga yang tidak tercakup dalam perantara keuangan, serta kegiatan pendistribusian dana bukan dalam bentuk pinjaman. Subkategori ini mencakup kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi, pegadaian, pembiayaan konsumen, pembiayaan kartu kredit, modal ventura, anjak piutang, dan jasa keuangan lainnya.

Perkembangan Aktivitas Keuangan dan Asuransi di Kota Tanjungpinang menunjukkan pergerakan yang positif selama tahun 2013 hingga tahun 2016 (Gambar 7.1). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 dengan laju sebesar 6,32 persen, terjadi perlambatan di tahun 2016 menjadi sebesar 3,15 persen. Perlambatan yang terjadi bukan karena turunnya nilai tambah yang dihasilkan oleh Aktivitas Keuangan dan Asuransi di Kota Tanjungpinang melainkan peningkatan nilai tambah yang terjadi ditahun 2016 tidak sebesar peningkatan nilai tambah yang terjadi pada tahun sebelumnya.

2. Aktivitas Keuangan dan Asuransi Menyokong Usaha Mikro dan Kecil

Aktivitas Keuangan dan Asuransi memiliki peranan yang signifikan dalam menyokong perekonomian suatu daerah. Dalam suatu sistem perekonomian, lapangan usaha ini bergerak sebagai penunjang bagi aktivitas lapangan usaha lain. Tidak dapat dipungkiri, begitu banyak usaha, baik skala mikro, kecil bahkan hingga besar, meminta “pertolongan” permodalan dari Jasa Perantara Keuangan, seperti Bank Konvensional juga Syariah, Bank Perkreditan Rakyat hingga koperasi simpan pinjam. Bahkan sebenarnya bukan hanya permodalan, jasa dari lapangan usaha Aktivitas Keuangan dan Asuransi juga banyak diandalkan dalam proses pengelolaan keuangan usaha juga asuransi barang modal yang digunakan.

Persebaran Usaha Aktivitas Keuangan dan Asuransi di Kota Tanjungpinang digambarkan dalam Tabel 7.1. Terlihat cukup jelas bahwa Usaha Aktivitas Keuangan dan Asuransi di Kota Tanjungpinang paling banyak berada di Kecamatan Tanjungpinang Timur, mencapai 41,96 persen. Kecamatan Bukit Bestari merupakan wilayah terbesar kedua menjadi lokasi berdirinya usaha-usaha Aktivitas Keuangan dan Asuransi yang juga cukup banyak, sekitar 27,23 persen. Sedangkan di dua kecamatan lainnya hanya terdapat 69 unit usaha, atau sekitar 30,80 persen dari usaha yang ada di Kota Tanjungpinang. Kontribusi dalam menciptakan lapangan usaha di wilayah Provinsi Kepulauan Riau cukup besar yakni sekitar 17,24 persen dengan persentase penyerapan tenaga kerja sebesar 20,28 persen.

Cukup menarik bila diperhatikan, usaha Aktivitas Keuangan dan Asuransi memiliki persebaran yang dapat dikatakan “pasti ada” di setiap daerah. Dari semua kecamatan yang ada di Kota Tanjungpinang memiliki usaha Aktivitas Keuangan dan Asuransi, setiap

usaha berhasil menyerap tenaga kerja 9 orang sampai dengan 24 orang . Hal ini secara implisit memang menunjukkan bahwa keberadaan lapangan usaha Aktivitas Keuangan dan Asuransi sangat esensial bagi seluruh daerah, baik untuk menunjang perekonomian lapangan usaha lain, maupun menyokong kehidupan sosial masyarakat daerah tersebut.

Begitu pentingnya peranan Aktivitas Keuangan dan Asuransi dalam menunjang perekonomian, menunjukkan bahwa lapangan usaha ini layak untuk dikembangkan dengan lebih intensif. Hal ini dikarenakan perkembangan lapangan usaha Aktivitas Keuangan dan Asuransi di suatu daerah, dapat mendongkrak lapangan usaha lain untuk lebih berkembang pula. Dengan demikian, perekonomian daerah secara tidak langsung akan meningkat juga secara simultan.

Tabel 7.1
Jumlah Usaha/Perusahaan dan Tenaga Kerja Kategori di Tanjungpinang menurut Kecamatan, 2016

Kecamatan	Usaha/Perusahaan		Tenaga Kerja		Rata-rata Jumlah Tenaga Kerja per Perusahaan
	Jumlah	% Terhadap Kota Tanjungpinang	Jumlah	% Terhadap Kota Tanjungpinang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bukit Bestari	61	27,23	579	17,91	9
Tanjungpinang Timur	94	41,96	1 269	39,25	14
Tanjungpinang Kota	38	16,96	911	28,18	24
Tanjungpinang Barat	31	13,84	474	14,66	15
Kota Tanjungpinang	224	17,24*	3 233	20,28*	14
Kepulauan Riau	1 299	100,00*	15 938	100,00*	12

Catatan: * Persentase terhadap Kepulauan Riau

Sumber: BPS, Hasil SE2016 Listing



<https://tanjungpinangkota.bps.go.id>

Pengangkutan dan Pergudangan Potensial Dalam Perekonomian Tanjungpinang

<https://tanjungpinangkota.bps.go.id>

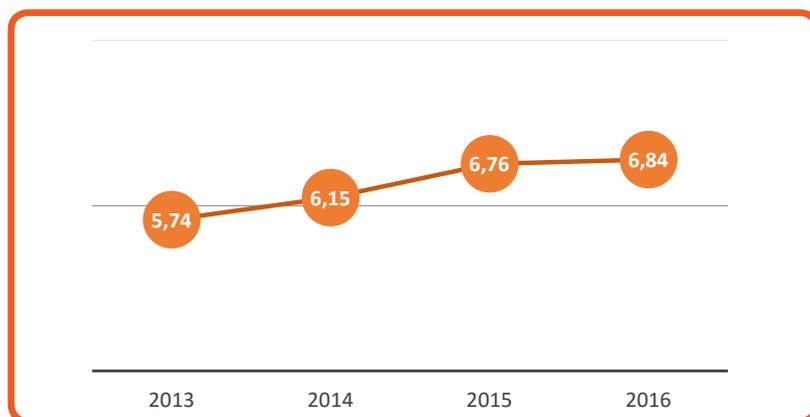
Pengangkutan dan Pergudangan Potensial Dalam Perekonomian Tanjungpinang

1. Keunggulan Usaha Pengangkutan dan Pergudangan di Tanjungpinang

Kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan. Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri atas: angkutan rel; angkutan darat; angkutan laut; angkutan sungai, danau dan penyeberangan; angkutan udara; pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir. Kegiatan pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Sedangkan jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti: terminal, pelabuhan, pergudangan, dan lain-lain.

Gambar 8.1

Kontribusi Kategori Pengangkutan dan Pergudangan Terhadap PDRB Kota Tanjungpinang (Persen), 2013-2016



Sumber: BPS, Hasil Olah PDRB Menurut Lapangan Usaha 2013-2016

Peranan usaha Pengangkutan dan Pergudangan dalam kegiatan perekonomian sangat penting, karena sektor ini merupakan penunjang dalam pendistribusian barang. Mengingat Tanjungpinang berada di daerah kepulauan sehingga transportasi sangat dibutuhkan dalam menghubungkan antar kabupaten/ kota lain, khususnya transportasi laut dan udara. Sedangkan aktivitas pergudangan merupakan salah satu unsur yang menunjang dalam kegiatan logistik. Menurut Coyle, Joseph, Bardy, & Edward (2003) terdapat 6 fungsi gudang yang mempunyai nilai tambah diantaranya adalah sebagai konsolidasi transportasi, bauran produk, crossdocking, jasa pelayanan, perlindungan terhadap kepadatan dan kelancaran distribusi produk. Secara umum aktivitas pergudangan mempunyai peran sebagai konsolidasi transportasi yaitu sebagai sarana penghubung antara produsen (*supplier*) dengan pabrik dan/atau antara pabrik dengan konsumen/ pasar.

Saat ini sektor Pengangkutan dan Pergudangan telah menyumbang nilai tambah perekonomian Kota Tanjungpinang sebesar 6,84 persen (Gambar 8.1). Kontribusinya terlihat meningkat setiap tahunnya sejak tahun 2013 hingga tahun 2016. Sedangkan jumlah usaha dalam sektor ini menyumbang 17,38 persen dari seluruh usaha di Kepulauan Riau pada kategori yang sama (Tabel 8.1). Hal ini mengindikasikan bahwa produktivitas sektor ini lebih kecil dari sektor lainnya. Namun potensi dari sisi jumlah usaha di Tanjungpinang sudah cukup menggambarkan jika wilayah ini dijadikan sebagai pengembangan aktivitas pengangkutan dan pergudangan sebagai potensi untuk peningkatan nilai tambah.

Dilihat dari sebarannya, usaha ini banyak terkonsentrasi di Kecamatan Tanjungpinang Timur.

Tabel 8.1

Jumlah Usaha/Perusahaan dan Tenaga Kerja Kategori Pengangkutan dan Pergudangan di Tanjungpinang menurut Kecamatan, 2016

Kecamatan	Usaha/Perusahaan		Tenaga Kerja		Rata-rata Jumlah Tenaga Kerja per Perusahaan
	Jumlah	% Terhadap Kota Tanjungpinang	Jumlah	% Terhadap Kota Tanjungpinang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bukit Bestari	253	24,26	389	20,05	2
Tanjungpinang Timur	362	34,71	763	39,33	2
Tanjungpinang Kota	233	22,34	485	25,00	2
Tanjungpinang Barat	195	18,70	303	15,62	2
Kota Tanjungpinang	1 043	17,38*	1 940	9,00*	2
Kepulauan Riau	6 002	100,00*	21 565	100,00*	4

Catatan: * Persentase terhadap Kepulauan Riau

Sumber: BPS, Hasil SE2016 Listing

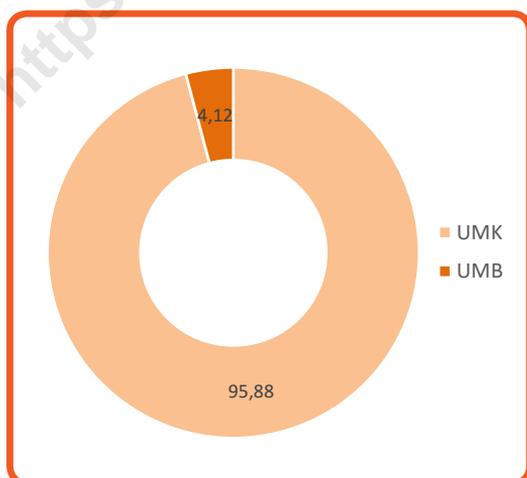
Aktivitas perekonomian di kecamatan ini memang terlihat lebih banyak dibandingkan kecamatan lainnya karena fasilitas dan infrastruktur serta wilayah dan persebaran penduduk yang relatif lebih banyak. Namun demikian, dilihat dari rata-rata jumlah tenaga kerjanya, usaha ini hanya mempekerjakan 2 orang. Dengan kata lain mayoritas usaha ini dilakukan secara perorangan.

2. Karakteristik Usaha Pengangkutan dan Pergudangan di Tanjungpinang

Usaha yang bergerak dibidang pengangkutan dan pergudangan di Kota Tanjungpinang didominasi oleh usaha berskala mikro kecil. Sekitar 95,88 persen merupakan Usaha Mikro Kecil (UMK). Meskipun jumlah usaha hanya berkisar 4,12 persen, namun penyerapan tenaga UMB kategori Pengangkutan dan Pergudangan mencapai 730 tenaga kerja atau sekitar 37,63 persen dari seluruh tenaga kerja pada kategori ini. Penyerapan tenaga kerja Kategori Pengangkutan dan Pergudangan pada Usaha Mikro Kecil (UMK) lebih besar sekitar 25 poin dari Usaha Menengah Besar (UMB).

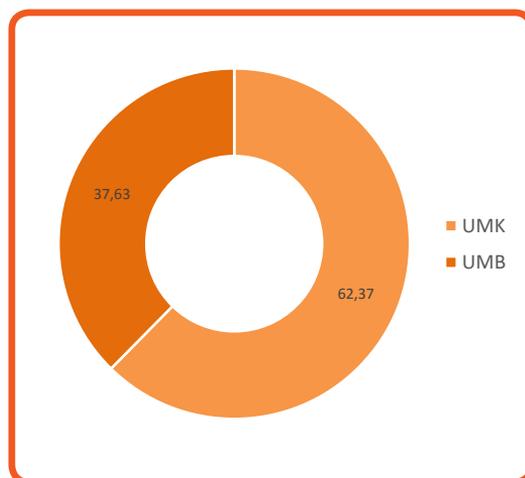
Pertumbuhan kategori Pengangkutan dan Pergudangan mencapai lebih dari 5 persen di tahun 2016, meskipun terjadi perlambatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya tidak berarti nilai produksi yang dihasilkan mengalami penurunan melainkan penambahan yang terjadi ditahun 2016 tidak setinggi dari tahun sebelumnya.

Gambar 8.2
Persentase Jumlah Usaha/Perusahaan
dan Kategori Pengangkutan dan
Pergudangan di Tanjungpinang menurut
Skala Usaha, 2016



Sumber: BPS, Hasil SE2016 Listing

Gambar 8.3
Persentase Jumlah Tenaga Kerja Kategori
Pengangkutan dan Pergudangan di
Tanjungpinang menurut Skala Usaha,
2016



Sumber: BPS, Hasil SE2016 Listing

bab 9



Informasi dan
Komunikasi
Sebagai Penunjang
Perekonomian
Tanjungpinang

<https://tanjungpinangkota.bps.go.id>

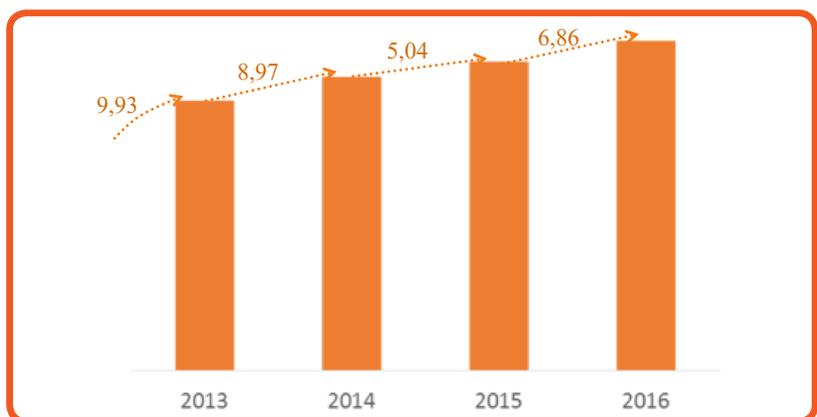
Informasi dan Komunikasi Sebagai Penunjang Perekonomian Tanjungpinang

1. Perkembangan Usaha Informasi dan Komunikasi di Tanjungpinang

Kategori ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, persediaan alat untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk ini dan juga data atau kegiatan komunikasi, informasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya. Kategori terdiri dari beberapa industri yaitu Penerbitan, Produksi Gambar Bergerak, Video, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik, Penyiaran dan Pemrograman (Radio dan Televisi), Telekomunikasi, Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Teknologi Informasi.

Kegiatan industri penerbitan mencakup penerbitan buku, brosur, leaflet, kamus, ensiklopedia, atlas, peta dan grafik, penerbitan surat kabar, jurnal dan majalah atau tabloid, termasuk penerbitan piranti lunak. Semua bentuk penerbitan (cetakan, elektronik atau audio,

Gambar 9.1
Pertumbuhan Kategori Informasi dan Komunikasi Tanjungpinang (Persen), 2013-2016



Sumber: BPS, Hasil Olah PDRB Menurut Lapangan Usaha 2013-2016

pada internet, sebagai produk multimedia seperti cd rom buku referensi dan lain-lain)

Kegiatan industri penyiaran dan pemrograman (radio dan televisi) ini mencakup pembuatan isi siaran atau perolehan hak untuk menyalurkannya dan kemudian menyiarkannya, seperti radio, televisi dan program hiburan, berita, perbincangan dan sejenisnya. Juga termasuk penyiaran data, khususnya yang terintegrasi dengan penyiaran radio atau TV.

Kegiatan industri telekomunikasi ini mencakup kegiatan penyediaan telekomunikasi dan kegiatan jasa yaitu pemancar suara, data, naskah, bunyi dan video. Fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini dapat berdasar pada teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Umumnya kegiatan ini adalah transmisi dari isi, tanpa terlibat dalam proses pembuatannya.

Dalam setiap kegiatan ekonomi, peran teknologi informasi dan teknologi menjadi hal yang sangat penting. Selain mampu menciptakan kreatifitas, teknologi informasi dan komunikasi mampu menciptakan efisiensi dalam setiap proses suatu kegiatan usaha. Perkembangan informasi dan komunikasi dalam suatu kegiatan perekonomian digambarkan seberapa besar kategori tersebut dalam menciptakan nilai tambah untuk menghasilkan Produk Domestik Regional Bruto Kota Tanjungpinang.

Kategori Informasi dan Komunikasi terus mengalami pertumbuhan sejak tahun 2013

Tabel 9.1

Jumlah Usaha/Perusahaan dan Tenaga Kerja Kategori Pengangkutan dan Pergudangan di Tanjungpinang menurut Kecamatan, 2016

Kecamatan	Usaha/Perusahaan		Tenaga Kerja		Rata-rata Jumlah Tenaga Kerja per Perusahaan
	Jumlah	% Terhadap Kota Tanjungpinang	Jumlah	% Terhadap Kota Tanjungpinang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bukit Bestari	139	28,14	420	35,26	3
Tanjungpinang Timur	211	42,71	517	43,41	2
Tanjungpinang Kota	38	7,69	50	4,20	1
Tanjungpinang Barat	106	21,46	204	17,13	2
Kota Tanjungpinang	494	14,28*	1 191	15,82*	2
Kepulauan Riau	3 459	100,00*	7 530	100,00*	2

Catatan: * Persentase terhadap Kepulauan Riau

Sumber: BPS, Hasil SE2016 Listing

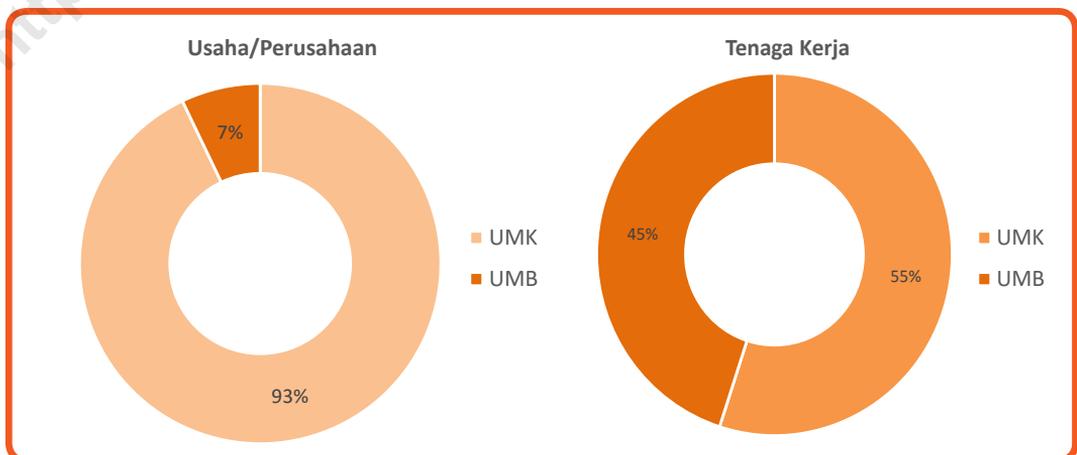
hingga tahun 2016, hal ini terlihat dari pertumbuhan PDRB pada kategori ini berada pada level yang positif dan berada pada urutan ke lima tertinggi dibandingkan kategori lainnya. Tahun 2016 pertumbuhannya mencapai 6,86 persen, mengalami percepatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan laju pertumbuhan sebesar 5,04 persen (Gambar 9.1).

2. Kontribusi Usaha Informasi dan Komunikasi di Tanjungpinang

Sebaran usaha informasi dan komunikasi mayoritas terkonsentrasi di Kecamatan Tanjungpinang Timur dan Kecamatan Bukit Bestari. Jumlah penduduk yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain ditengarai memacu perkembangan informasi dan komunikasi lebih cepat pada 2 kecamatan tersebut. Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi 2016, terdapat 2,52 persen usaha yang bergerak dalam kegiatan informasi dan komunikasi di Kota Tanjungpinang. Sekitar 42,71 persen usaha produksi dan distribusi informasi dan komunikasi beroperasi di Kecamatan Tanjungpinang Timur, sekitar 28,14 persen beroperasi di Kecamatan Bukit Bestari.

Kontribusi Kategori Informasi dan Komunikasi terhadap penciptaan lapangan usaha di Kota Tanjungpinang terhadap wilayah Kepulauan Riau sebesar 14,28 persen dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 15,82 persen. Sedangkan kontribusi Kategori Informasi dan Komunikasi terhadap pembentukan PDRB hanya sebesar 2,83 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa produktivitas kategori Informasi dan Komunikasi ini lebih kecil dari sektor lainnya. Namun potensi dari sisi jumlah usaha dan tenaga kerja di Tanjungpinang sudah cukup memberikan kontribusi di wilayah Kepulauan Riau.

Gambar 9.2
Persentase Jumlah Usaha/Perusahaan dan Tenaga Kerja Kategori Informasi dan Komunikasi di Tanjungpinang menurut Skala Usaha, 2016



Sumber: BPS, Hasil SE2016 Listing

bab

10



Potensi Lapangan Usaha Lain di Kota Tanjungpinang

<https://tanjungpinangkota.bps.go.id>

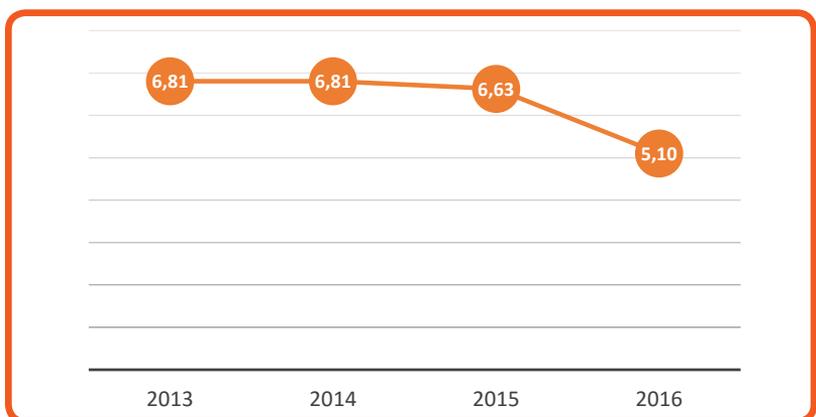
Potensi Lapangan Usaha Lain di Kota Tanjungpinang

1. Perkembangan *Real Estate* di Kota Tanjungpinang

Lapangan usaha *Real Estat* menurut KBLI 2015 merupakan lapangan usaha yang meliputi kegiatan persewaan, agen dan atau perantara dalam penjualan atau pembelian real estat serta penyediaan jasa *real estat* lainnya bisa dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lain yang dilakukan atas dasar balas jasa kontrak. Selain itu, lapangan usaha *Real Estat* juga mencakup kegiatan pembangunan gedung yang disatukan dengan pemeliharaan atau penyewaan bangunan.

Perkembangan lapangan usaha *Real Estat* di Kota Tanjungpinang terbilang cukup pesat. Laju pertumbuhan lapangan usaha ini relatif tinggi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Pada tahun 2014, *Real Estate* Kota Tanjungpinang mengalami laju pertumbuhan sebesar 6,81 persen. Pada tahun berikutnya, laju pertumbuhan mencapai 6,63 persen. Pada tahun 2016, pertumbuhan *Real Estat* masih cukup tinggi, yakni sekitar 5,10 persen.

Gambar 10.1
Pertumbuhan Kategori *Real Estate* Tanjungpinang (Persen), 2013-2016

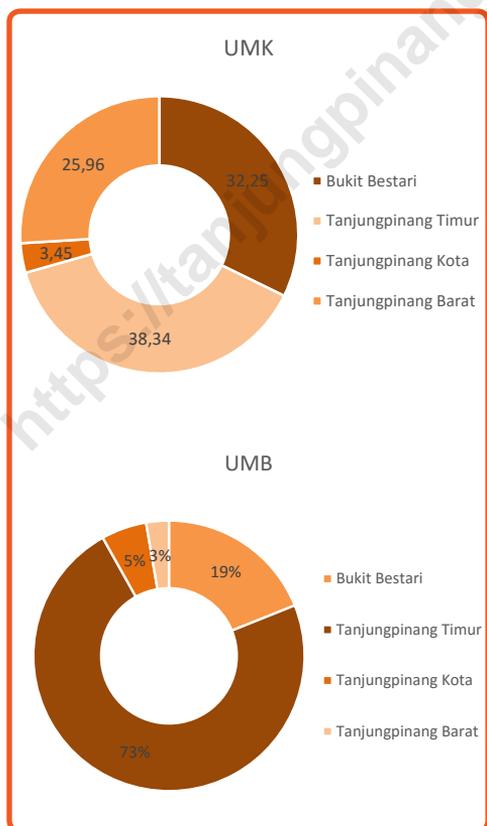


Sumber: BPS, Hasil Olah PDRB Menurut Lapangan Usaha 2013-2016

Sebaran usaha *real estate* mayoritas terkonsentrasi di Kecamatan Tanjungpinang Timur. Jumlah penduduk yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Kecamatan lain diduga memacu perkembangan usaha *real estat* lebih cepat pada kecamatan tersebut. Hal ini sejalan dengan perkembangan lapangan usaha konstruksi yang melakukan pengembangan pembangunan seperti tempat tinggal di Kecamatan Tanjungpinang Timur. Dalam program tersebut, ada begitu banyak pengembang (developer) di Tanjungpinang yang menawarkan perumahan dengan harga yang terjangkau untuk masyarakat.

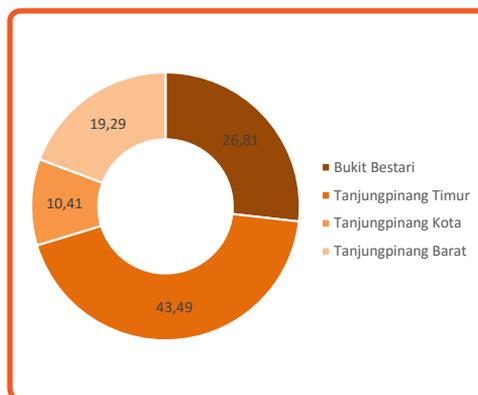
Kegiatan usaha *Real Estate* di Kecamatan Tanjungpinang Timur mencapai 40,75 persen dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 43,49 persen. Sementara di Kecamatan Bukit Bestari terdapat 31,32 usaha/perusahaan Real Estate dan berhasil menyerap tenaga kerja sebesar 26,81 persen.

Gambar 10.2
Persebaran Usaha/Perusahaan Real Estate di Kota Tanjungpinang Menurut Skala Usaha (Persen), 2016



Sumber: BPS, Hasil SE2016 Listing

Gambar 10.3
Persebaran Tenaga Kerja Kategori Real Estate di Kota Tanjungpinang (Persen), 2016



Sumber: BPS, Hasil SE2016 Listing

Hasil Pencacahan Lengkap SE2016 menunjukkan usaha Real Estat di Kota Tanjungpinang didominasi oleh usaha dengan skala Mikro dan Kecil, seperti persewaan bangunan rumah maupun tempat usaha yang dilakukan perseorangan (93,02 persen). Sedangkan jumlah Usaha Menengah Besar (UMB) seperti perusahaan properti, penyewaan ruang/ lahan perkantoran/usaha hanya mencapai kurang dari 7 persen.

2. Peluang Jasa Perusahaan Dalam Perekonomian Kota Tanjungpinang

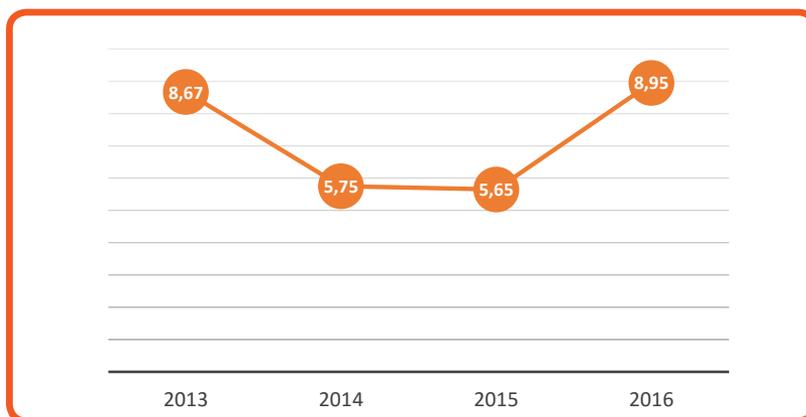
Lapangan usaha Jasa Perusahaan merupakan gabungan dari 2 (dua) kategori, yakni kategori M dan kategori N. Kategori M mencakup kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik yang membutuhkan tingkat pelatihan yang tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan khusus yang tersedia untuk pengguna. Kegiatan yang termasuk kategori M antara lain: jasa hukum dan akuntansi, jasa arsitektur dan teknik sipil, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, periklanan dan penelitian pasar, serta jasa profesional, ilmiah dan teknis lainnya. Kategori N mencakup berbagai kegiatan yang mendukung operasional usaha secara umum. Kegiatan yang termasuk kategori N antara lain: jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, jasa ketenagakerjaan, jasa agen perjalanan, penyelenggaraan tur dan jasa reservasi lainnya, jasa keamanan dan penyelidikan, jasa untuk gedung dan pertamanan, jasa administrasi kantor, serta jasa penunjang kantor dan jasa penunjang usaha lainnya.

Peranan Jasa Perusahaan dalam pembentukan PDRB Kota Tanjungpinang memang relatif kecil bila dibandingkan dengan lapangan usaha lainnya. Jasa Perusahaan berkontribusi relatif tidak bergerak dari besaran 0,01 persen terhadap PDRB Kota Tanjungpinang dalam periode 4 tahun terakhir.

Di sisi lain, laju pertumbuhan Jasa Perusahaan memiliki kondisi yang lebih baik. Dalam periode 3 tahun terakhir, lapangan usaha ini memiliki laju pertumbuhan yang selalu bernilai positif. Namun begitu, perkembangan laju pertumbuhan Jasa Perusahaan mengalami perlambatan dalam 3 tahun terakhir. Peningkatan kinerja Jasa Perusahaan tahun 2016 lebih tinggi dibandingkan peningkatan yang terjadi pada tahun sebelumnya. Sehingga Jasa Perusahaan memiliki peluang besar dalam peningkatan perekonomian Tanjungpinang.

Gambar 10.4

Pertumbuhan Kategori Jasa Perusahaan di Kota Tanjungpinang (Persen), 2013-2016



Sumber: BPS, Hasil Olah PDRB Menurut Lapangan Usaha 2013-2016

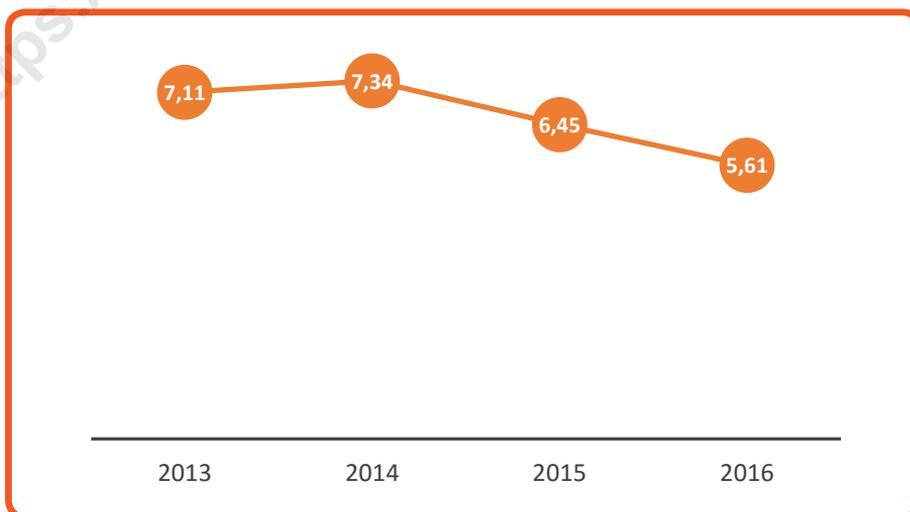
3. Pendidikan Pembentuk SDM Berkualitas

Lapangan usaha Jasa Pendidikan mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga, hiburan dan penunjang pendidikan. Pendidikan dapat disediakan dalam ruangan, melalui penyiaran radio dan televisi, internet dan surat menyurat. Tingkat pendidikan dikelompokkan seperti kegiatan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan lain, mencakup juga jasa penunjang pendidikan dan pendidikan anak usia dini.

Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan merupakan salah satu arah pembangunan Kota Tanjungpinang khususnya dalam peningkatan peran pemuda dalam pembangunan. Pembangunan bidang pendidikan termasuk ke dalam salah satu program prioritas yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah.

Kinerja lapangan usaha Jasa Pendidikan Kota Tanjungpinang sendiri terbilang cukup baik. Sejak tahun 2013, laju pertumbuhan lapangan usaha ini selalu bernilai positif, meskipun memang mengalami perlambatan dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan Kategori Pendidikan tahun 2016 mencapai 5,61 persen, melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan laju sebesar 6,45 persen.

Gambar 10.5
Pertumbuhan Kategori Pendidikan di Kota Tanjungpinang (Persen),
2013-2016



Sumber: BPS, Hasil Olah PDRB Menurut Lapangan Usaha 2013-2016

4. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial serta Jasa Lainnya Sebagai Pendukung Perekonomian Tanjungpinang

Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial merupakan salah satu lapangan usaha yang termasuk sektor penyedia jasa. Kategori Jasa Lainnya yang menjadi cakupan dalam Pencacahan Lengkap SE2016 merupakan gabungan 3 kategori pada KBLI 2015. Kategori ini mempunyai kegiatan yang cukup luas yang meliputi: Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi; Jasa Reparasi Komputer Dan Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga; Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Sendiri untuk memenuhi kebutuhan; juga Jasa Swasta Lainnya.

Laju pertumbuhan yang positif dari Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial diindikasikan terjadi karena aktivitas penyediaan jasa yang berhubungan dengan kesehatan semakin berkembang di Kota Tanjungpinang. Jasa kesehatan yang beroperasi tidak hanya terbatas dalam bentuk Rumah Sakit Pemerintah ataupun Puskesmas, melainkan mulai meluas dalam bentuk Klinik Swasta hingga Praktek Dokter. Hal ini tentu berarti sangat positif, bukan hanya sekedar peningkatan perekonomian Kota Tanjungpinang, tetapi juga mencerminkan adanya peningkatan pelayanan kesehatan untuk masyarakat.

Persebaran usaha/ perusahaan Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial di Kota Tanjungpinang terbanyak berada di Kecamatan Tanjungpinang Timur sebesar 33,44 persen dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 36,56 persen.

Tabel 10.1
Jumlah Usaha/Perusahaan dan Tenaga Kerja Kategori Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial di Tanjungpinang menurut Kecamatan, 2016

Kecamatan	Usaha/Perusahaan		Tenaga Kerja	
	UMK	UMB	UMK	UMB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bukit Bestari	94	5	293	89
Tanjungpinang Timur	100	1	377	545
Tanjungpinang Kota	32	3	88	476
Tanjungpinang Barat	64	3	207	447
Kota Tanjungpinang	290	12	965	1 557

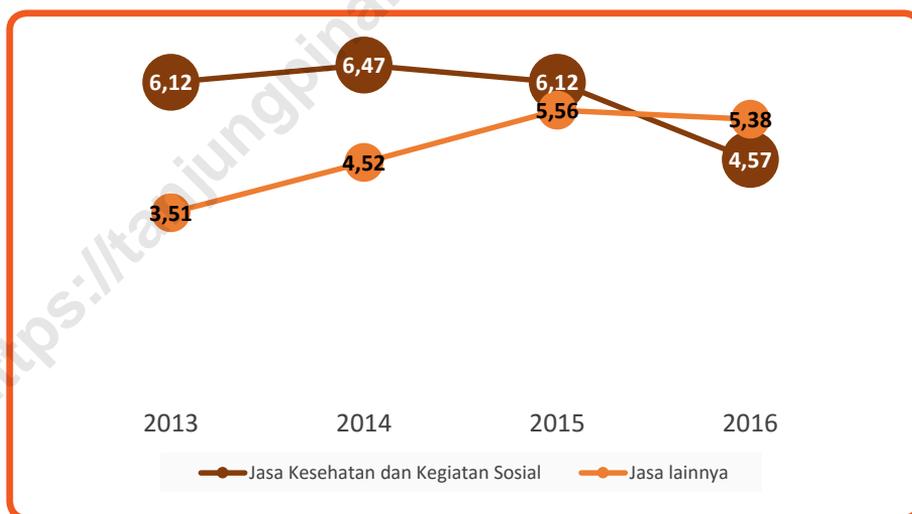
Sumber: BPS, Hasil SE2016 Listing

Perkembangan kinerja lapangan usaha Jasa Lainnya di Kota Tanjungpinang terhitung stabil. Sejak tahun 2013, laju pertumbuhan lapangan usaha ini selalu bernilai positif. Kinerja Jasa Lainnya cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2013 hingga tahun 2015, namun pada tahun 2016 laju pertumbuhan sedikit mengalami perlambatan yakni sebesar 5,38 persen.

Usaha/ perusahaan Jasa Lainnya di Kota Tanjungpinang juga didominasi oleh usaha yang memiliki skala usaha Mikro. Hasil Pencacahan Lengkap SE2016 menunjukkan bahwa usaha Jasa Lainnya dengan skala usaha Mikro di Kota Tanjungpinang mencapai lebih dari 98,78 persen.

Tenaga kerja yang mampu diserap oleh lapangan usaha jasa lainnya mencapai 3,74 persen. Dari total tenaga kerja pada kategori ini, sekitar 88,31 persen merupakan tenaga kerja pada UMK dan sekitar 11,69 persen pada UMB.

Gambar 10.5
Pertumbuhan Kategori Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial serta Jasa Lainnya di Kota Tanjungpinang (Persen), 2013-2016



Sumber: BPS, Hasil Olah PDRB Menurut Lapangan Usaha 2013-2016

<https://tanjungpinangkota.bps.go.id>

bab 11



Kesimpulan

Perekonomian Kota Tanjungpinang relatif stabil selama periode 2013-2016. Selain itu Usaha Mikro Kecil (UMK) yang mendominasi memberi andil dalam menjaga stabilitas perekonomian. Dalam mencapai kinerja perekonomian yang optimal, terdapat beberapa faktor pendukung baik dari dalam maupun luar. Faktor pendukung yang utama adalah kualitas SDM, kualitas SDM yang tinggi akan mendukung peningkatan produktivitasnya. Tingginya kualitas SDM terlihat dari IPM Kota Tanjungpinang yang tinggi. Selain SDM, faktor sarana dan prasarana juga sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Dari aspek ini Tanjungpinang sudah mempunyai infrastruktur yang mumpuni dalam mendukung kegiatan perekonomian. Oleh sebab itu pembangunan yang merata antarwilayah menyebabkan persebaran aktivitas ekonomi yang tersebar di beberapa wilayah.

Dari beberapa hasil analisis yang digunakan seperti *Location Quotient (LQ)*, Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP); *Analisis Shift Share (SS)*; dan Analisis *Tipologi Klassen* dengan mengambil wilayah referensi Kepulauan Riau maka diperoleh bahwa di Kota Tanjungpinang memiliki 10 (sepuluh) lapangan usaha yang unggulan baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun terhadap pertumbuhan yang pesat.

Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (G) dan Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (I) merupakan sektor unggulan dalam penyerapan tenaga kerja dan memiliki potensi baik di Tanjungpinang maupun di wilayah Kepulauan Riau serta memiliki pertumbuhan yang pesat.

Lapangan usaha Konstruksi (F) dan Aktivitas Keuangan dan Asuransi (K) merupakan sektor unggulan pada wilayah Kota Tanjungpinang maupun Provinsi Kepulauan Riau tetapi memiliki pertumbuhan yang terhambat. Sedangkan kategori Informasi dan Komunikasi (J) merupakan lapangan usaha unggulan dalam penyerapan tenaga kerja serta menjadi penunjang perekonomian Kota Tanjungpinang.

Kegiatan Pengangkutan dan Pergudangan (H) merupakan lapangan usaha yang berpotensi dalam perekonomian Kota Tanjungpinang meskipun tidak memiliki keunggulan dalam penyerapan tenaga kerja. Sedangkan lapangan usaha yang memiliki keunggulan dalam penyerapan tenaga kerja dengan pertumbuhan terhambat tetapi berkembang di wilayah Tanjungpinang adalah Real Estate (L), Jasa Perusahaan (M,N), Pendidikan (P), Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial (Q), dan Jasa Lainnya (R,S,U).



Daftar Pustaka

<https://tanjungpinangkota.bps.go.id>

Daftar Pustaka

- BPS Kota Tanjungpinang. 2017. Produk Domestik Regional Bruto Kota Tanjungpinang Menurut Lapangan Usaha 2012-2016. Tanjungpinang.
- BPS Kota Batam. 2017. Produk Domestik Regional Bruto Kota Batam Menurut Lapangan Usaha 2012-2016. Batam
- BPS Kabupaten Bintan. 2017. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bintan Menurut Lapangan Usaha 2012-2016. Bintan
- BPS Kabupaten Karimun. 2017. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Karimun Menurut Lapangan Usaha 2012-2016. Karimun
- BPS Provinsi Kepulauan Riau. 2017. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha 2012-2016. Tanjungpinang.
- BPS Kota Tanjungpinang. 2017. Kota Tanjungpinang Dalam Angka 2017. Tanjungpinang
- BPS Kota Tanjungpinang. 2017. Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Tanjungpinang 2016. Tanjungpinang
- BPS Kota Tanjungpinang. 2017. Data Hasil Pendaftaran Usaha/Perusahaan Sensus Ekonomi 2016 Kota Tanjungpinang. Tanjungpinang.
- BAPPELITBANG Kota Tanjungpinang. Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungpinang 2013-2018. Tanjungpinang.
- BPS Provinsi Kepulauan Riau. 2016. Analisis Sektor Unggulan Provinsi Kepulauan Riau 2016. Tanjung Pinang.
- Razi, Muhammad. 2015. Hubungan Antara Pertumbuhan Penduduk dengan Petumbuhan Ekonomi di Indonesia dan Singapura (Jurnal Ekonomi). Universitas Nusa Bangsa. Bogor



Lampiran

<https://tanjungpinangkota.bps.go.id>

Lampiran 1.
Jumlah Usaha/Perusahaan Hasil Sensus Ekonomi 2016 Menurut Kategori Usaha di
Tanjungpinang, 2016

Kategori	UMK	UMB	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
B,D,E Sumber Daya Alam	129	12	141
C Industri Pengolahan	2 047	24	2 071
F Konstruksi	250	75	325
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	7 396	207	7 603
H Pengangkutan dan Pergudangan	1 000	43	1 043
I Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	4 792	41	4 833
J Informasi dan Komunikasi	459	35	494
K Aktivitas Keuangan dan Asuransi	71	153	224
L Real Estate	493	37	530
M,N Jasa Perusahaan	383	91	474
P Pendidikan	458	19	477
Q Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	290	12	302
R,S,U Jasa Lainnya	1 056	13	1 069
Kota Tanjungpinang	18 824	762	19 586

Sumber: BPS, Hasil SE2016 Listing

Lampiran 2.
Jumlah Tenaga Kerja Hasil Sensus Ekonomi 2016 Menurut Kategori Usaha di
Tanjungpinang, 2016

Kategori	UMK	UMB	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
B,D,E Sumber Daya Alam	341	735	1 076
C Industri Pengolahan	4 063	1 496	5 559
F Konstruksi	2 577	3 276	5 853
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	13 022	3 345	16 367
H Pengangkutan dan Pergudangan	1 210	730	1 940
I Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	8 496	1 160	9 656
J Informasi dan Komunikasi	655	536	1 191
K Aktivitas Keuangan dan Asuransi	514	2 719	3 233
L Real Estate	597	440	1 037
M,N Jasa Perusahaan	920	3 058	3 978
P Pendidikan	4 279	1 042	5 321
Q Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	965	1 557	2 522
R,S,U Jasa Lainnya	1 980	262	2 242
Kota Tanjungpinang	39 619	20 356	59 975

Sumber: BPS, Hasil SE2016 Listing

Lampiran 3.
Banyaknya Usaha/Perusahaan Menurut Kabupaten/Kota dan Skala Usaha dan Konsep Pengelompokan Skala Usaha di Provinsi Kepulauan Riau, 2016

Kategori	Skala Usaha				Jumlah
	Mikro	Kecil	Menengah	Besar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
[01] KARIMUN	16 731	1 760	459	27	18 977
[02] BINTAN	10 795	1 024	258	29	12 106
[03] NATUNA	7 709	759	113	6	8 587
[04] LINGGA	8 631	700	66	1	9 398
[05] KEPULAUAN ANAMBAS	4 840	494	68	5	5 407
[71] B A T A M	65 460	10 115	5 436	436	81 447
[72] TANJUNG PINANG	16 876	1 948	718	44	19 586
[XX] KEPULAUAN RIAU	131 042	16 800	7 118	548	155 508

Sumber: BPS, Hasil SE2016 Listing

Lampiran 4.
Banyaknya Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Skala Usaha dan Konsep Pengelompokan Skala Usaha di Provinsi Kepulauan Riau, 2016

Kategori	Skala Usaha				Jumlah
	Mikro	Kecil	Menengah	Besar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
[01] KARIMUN	29 124	11 226	8 355	12 901	61 606
[02] BINTAN	23 694	8 472	6 671	13 120	51 957
[03] NATUNA	13 409	5 632	1 420	238	20 699
[04] LINGGA	14 701	4 952	1 080	19	20 752
[05] KEPULAUAN ANAMBAS	8 300	4 481	1 267	1 563	15 611
[71] B A T A M	105 192	51 805	110 313	144 215	411 525
[72] TANJUNG PINANG	27 608	12 011	15 286	5 070	59 975
[XX] KEPULAUAN RIAU	222 028	98 579	144 392	177 126	642 125

Sumber: BPS, Hasil SE2016 Listing

Lampiran 5.
Banyaknya Usaha/Perusahaan Menurut Kabupaten/Kota dan Status Badan Usaha di Provinsi Kepulauan Riau, 2016

Kategori	Kode status badan usaha										Jumlah	
	PT/PT Persero/ Perum (2)	CV (3)	Firma (4)	K o p e r a s i / Dana Pensiun (5)	Yayasan (6)	Ijin Khusus (7)	Perwakilan perusahaan/ lembaga asing (8)	Tidak berbadan usaha (9)				
(1)												(10)
[01] KARIMUN	395	131	2	58	157	3 816	0	14 418				18 977
[02] BINTAN	254	63	2	43	89	1 831	0	9 824				12 106
[03] NATUNA	79	100	0	35	103	959	0	7 311				8 587
[04] LINGGA	44	38	0	39	46	1 854	0	7 377				9 398
[05] KEPULAUAN ANAMBAS	49	62	0	10	16	459	0	4 811				5 407
[71] B A T A M	5 671	1 314	49	158	961	3 994	2	69 298				81 447
[72] TANJUNG PINANG	692	379	10	60	124	2 449	0	15 872				19 586
[XX] KEPULAUAN RIAU	7 184	2 087	63	403	1 496	15 362	2	128 911				155 508

Sumber: BPS, Hasil SE2016 Listing

Lampiran 6.
Banyaknya Usaha/Perusahaan menurut Kabupaten/Kota dan Lama Beroperasi di
Provinsi Kepulauan Riau, 2016

Kategori	Skala Usaha				Jumlah
	< 1 tahun	1-5 tahun	6-10 tahun	> 10 tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
[01] KARIMUN	1 644	8 508	3 776	5 049	18 977
[02] BINTAN	969	5 935	2 682	2 520	12 106
[03] NATUNA	723	3 643	2 113	2 108	8 587
[04] LINGGA	594	4 141	2 019	2 644	9 398
[05] KEPULAUAN ANAMBAS	529	2 907	1 057	914	5 407
[71] B A T A M	8 667	44 903	16 259	11 618	81 447
[72] TANJUNG PINANG	1 884	8 966	4 021	4 715	19 586
[XX] KEPULAUAN RIAU	15 010	79 003	31 927	29 568	155 508

Sumber: BPS, Hasil SE2016 Listing

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA TANJUNGPINANG**

Jl. WR. Supratman No.1 Km X, Tanjungpinang
Telp.: (0771) 444204
Homepage: <http://tanjungpinangkota.bps.go.id>
E-mail: bps2172@bps.go.id